

**PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH
PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

SKRIPSI



Oleh:

NELY FATHONAH
NIM 030 111 0595

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
1430H/ 2009M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI
DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

NAMA : NELY FATHONAH

NIM : 030 111 0595

JURUSAN : TARBIYAH

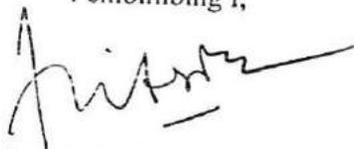
PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Palangka Raya, September 2009

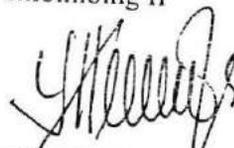
Menyetujui,

Pembimbing I,



DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 19581121 198503 2 001

Pembimbing II



YULIANI KHALFIAH, M.Pd
NIP. 19710317 199803 2 002

Mengetahui :

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag
19551231 198303 1 026

Ketua Jurusan Tarbiyah



H.J. HAMIDAH, MA
19700425 199703 2 003

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara NELY FATHONAH

Palangka Raya, 13 Oktober 2009

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palaangka Raya

Di -

Palangka Raya

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

NAMA : **NELY FATHONAH**

NIM : 030 111 0595

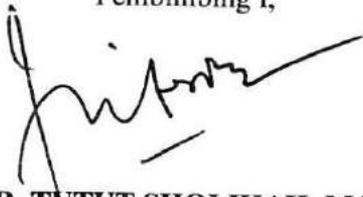
JUDUL : **PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI
DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

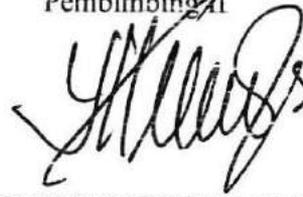
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I,



DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 19581121 198503 2 001

Pembimbing I



YULIANI KHALFIAH, M.PdI
NIP. 19710317 199803 2 002



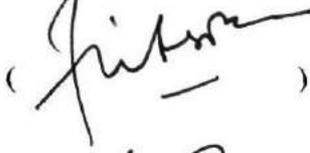
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**. Oleh Nely Fathonah, NIM. 030 111 0595, telah dimunaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada :

Hari : SABTU
Tanggal : 31 OKTOBER 2009 M
 : 12 DZULKAJDAH 1430 H

Palangka Raya, 31 Oktober 2009

Tim Penguji

1. Drs. H. SARDIMI, M.Ag ()
Ketua Sidang/Penguji
2. TRIWID SYAFARATUN NAJAH, M.Pd ()
Penguji
3. DR. TUTUT SHOLIAH, M.Pd ()
Penguji
4. YULIANI KHALFIAH, M.PdI ()
Sekretaris Sidang/Penguji



Ketua STAIN Palangka Raya

DR. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag

NIP. 19630118 199103 1 002

“PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT”

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; (b) untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; (c) untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar; (d) untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Dikpora Kecamatan Kumai, penilik pendidikan masyarakat (Dikmas) Kecamatan Kumai dan Guru (Pengajar) serta tokoh masyarakat dijadikan sebagai informan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, yang terdiri dari 4 tahap yaitu: 1) Pengumpulan data (*Data Collecting*), 2) Deduksi Data (*Data reduction*), 3) Penyajian Data (*data display*), 4) Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan mengadakan program antara lain Pembangunan ruang kelas baru, peningkatan guru bantu, honor maupun PNS dan pengadaan buku paket. Tapi dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang menghambat program tersebut yaitu ekonomi masyarakat pesisir yang masih lemah, minimnya sarana prasarana transportasi, sarana pendidikan masih kurang serta tingkat kepedulian masyarakatnya masih kurang. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar adalah dengan mengadakan perluasan kegiatan pendidikan luar sekolah yaitu membuka program kejar paket A dan B. masyarakat pesisir sebagian telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

THE IMPLEMENTATION OF BASIC EDUCATION ON COMPULSORY EDUCATION PROGRAM AT KUMAI BEACH AREA OF KUMAI SUB DISTRICT OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY

ABSTRACT

The aims of the study are: (a) to describe government programs in implementing the basic education on compulsory education program at Kumai Beach area of Kumai Sub District of Kotawaringin Barat Regency; (b) to describe the problems in implementing the basic education on compulsory education program at Kumai Beach area of Kumai Sub District of Kotawaringin Barat Regency; (c) to describe the government efforts to implement the basic education on compulsory education program; and (d) to describe the society's roles in implementing the basic education on compulsory education program at Kumai Beach area of Kumai Sub District of Kotawaringin Barat Regency.

The study belonged to qualitative descriptive approach. The subjects of the study were the chairperson of Dikpora of Kumai Sub District, the society education supervisor of Kumai, teachers and village figures as informants. To collect the data, the researcher used observation, interview and documentation techniques. The data validation was done by using triangulation. The data, then, were analyzed using some stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data display, and (4) drawing conclusion.

The results of the study showed that the government implemented the basic education on compulsory education program at Kumai Beach area of Kumai Sub District of Kotawaringin Barat Regency by providing programs such as building new classrooms, improving the aided teachers, non-permanent and civil servant teachers, and providing textbooks. However, in the implementation, there were some problems such as the society low economic status, lacking the means of transportation, lacking the teaching media, and the less of society education awareness. The government efforts to implement the basic education on compulsory education program were done by providing the broader education activity outside the school institution by opening the A and B learning packets. Meanwhile, the Kumai beach society was mostly participated in implementing the basic education on compulsory education program.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah memberikan bimbingan kepada umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan keamanan dan tali kasih persaudaraan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah berkenan menyetujui penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Tutut Sholihah, M.Pd., selaku Pembimbing I dan Ibu Yuliani Khalifah, M.PdI., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak/ Ibu Dosen STAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penuli

4. Bapak atau ibu pengelola perpustakaan STAIN Palangkaraya yang telah bersedia meminjamkan buku-buku untuk menunjang penulisan skripsi ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kecamatan Kumai yang telah banyak membantu memberikan data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Dan teman-teman mahasiswa angkatan 2003 yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan, jerih payah dan amal bakti yang telah diberikan, penulis doakan agar mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palangka Raya, September 2009
Penulis,



NELY FATHONAH
NIM. 030 111 0595

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2009
Yang Membuat Pernyataan,




NELY FATHONAH
NIM. 030 111 0595

MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

*"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka
Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu
dapat menjaga dirinya".
(Q.S. At-Taubah:122)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda (Almarhumah) tercinta,

Kakak tersayang serta seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan demi kesuksesanku dengan penuh harapan dan doa.

Sahabat-sahabat yang selalu membantuku dalam mencapai cita-cita dan cinta.

*Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT meridhoi segala usaha kita.
Amien...*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORIGINALITAS	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik.....	9
1. Wajib belajar Pendidikan Dasar	9
2. Tujuan Pendidikan Dasar	10
3. Jenjang Pendidikan Dasar	11
4. Tujuan dan Fungsi Wajib Belajar	20
5. Kendala-kendala Pada Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.....	21
6. Usaha/upaya Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.....	25
7. Masyarakat	27
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	29
1. Kerangka Pikir	29
2. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	32
B. Pendekatan dan Subjek Penelitian	32
C. Sumber Data dan Jenis Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Pengabsahan Data	39
F. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pelaksanaan Pendidikan Dasar Daerah Pesisir	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel.1	PERKEMBANGAN JUMLAH APK DAN APM SD/MI DI KALTENG TAHUN PELAJARAN 2005/2006 DAN 2006/2007	4
Tabel.2	PERKEMBANGAN JUMLAH APK DAN APM SLTP/MTS DI KAL-TENG TAHUN PELAJARAN 2005/2006 DAN 2006/2007.....	4
Tabel.3	APK SD/MI DAN APK SLTP/MTS DI PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI TAHUN PELAJARAN 2005/2006	5
Tabel.4	PROGRAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR	13
Tabel.5	PROGRAM KURIKULUM SLTP	15
Tabel.6	PROGRAM KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH.....	18
Tabel.7	SUSUNAN PROGRAM KURIKULUM MADRASAH TSANAWIYAH.....	19
Tabel.8	KONDISI ALAM DAERAH PESISIR.....	43
Tabel.9	DATA PENDUDUK DAERAH PESISIR	43
Tabel.10	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA	44
Tabel.11	SARANA UMUM MASYARAKAT	45
Tabel.12	SARANA IBADAH MASYARAKAT DESA	45
Tabel.13	SARANA PENDIDIKAN MASYARAKAT	46
Tabel.14	KEADAAN SD PER DESA DI DAERAH PESISIR	47
Tabel.15	KEADAAN SISWA SD DI PESISIR PANTAI KUMAI.....	48
Tabel.16	KEADAAN SISWA MI DI PESISIR	49
Tabel.17	DATA SISWA SMPN-4 KUMAI	49
Tabel.18	TINGKAT PENCAPAIAN PENDIDIKAN DASAR.....	51
Tabel.19	KONDISI RUANG BELAJAR	61

Tabel.20	KEADAAN WARGA BELAJAR KEJAR PAKET A	63
Tabel 21	KEADAAN WARGA BELAJAR KEJAR PAKET B	64
Tabel 22	KEADAAN TUTOR PROGRAM KEJAR PAKET A DAN B DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI	65

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Tanpa ilmu orang tidak bisa berkembang dan berwawasan luas. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Mujadillah ayat 11, yang berbunyi :

يَتَّيِبُهُا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فآنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ
أوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang meliputi semua lapisan masyarakat Indonesia, baik lapisan masyarakat berstatus sosial tinggi maupun masyarakat berstatus sosial rendah. Pendidikan merupakan hak dan kewajiban semua warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Amandemen ke IV pasal 31 ayat 1 dan 2, yaitu:

¹ Al-Mujadillah [58] : 11

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.²

Berdasarkan pasal 31 ayat 1 dan 2 tersebut di atas, maka masyarakat Indonesia berhak bahkan wajib mengikuti pendidikan minimal pada tingkat sekolah dasar.

Program wajib belajar dilaksanakan secara merata di semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Diharapkan dengan program wajib belajar ini keterbelakangan pendidikan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia dapat terkikis sedikit demi sedikit.

Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 yaitu:

1. Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.³

Masyarakat sebagai mitra pemerintah harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggara pendidikan nasional dengan ilmu pengetahuan teknologi dan tuntutan kebutuhan serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Darlan menyatakan bahwa:

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan peran serta masyarakat terus dikembangkan secara merata di seluruh

²Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 dan 2.

³Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 34 ayat (1, 2, 3).

tanah air dengan memberikan perhatian khusus berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat dan yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau tertinggal di Kalimantan Tengah.⁴

Guna mendukung keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar dan upaya-upaya pendidikan, jalinan kerjasama antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan orang tua dengan pemerintah hendaknya juga terus ditingkatkan. Hal ini penting karena tugas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya penuntasan tugas luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya tidak akan berhasil dengan baik.

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Kabupaten, Dinas Pendidikan Kecamatan (Dikmat), pendidik (kepala sekolah dan guru) maupun dari masyarakat itu sendiri.

Berikut ini data dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Kalimantan Tengah tentang perkembangan jumlah siswa-siswa, AP K dan APM SD/MI dan SLTP/ MTs tahun pelajaran 2005/2006 dan 2006/2007 di Kalimantan Tengah.

⁴Norsanie Darlan, "Strategi Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun bagi Masyarakat Desa Tertinggal". Palangka Raya: Universitas Palangka Raya, 2000, h. 3. t.d.

Tabel. 1
Perkembangan Jumlah APK dan APM SD/MI
Di Kal-Teng Tahun Pelajaran 2005/2006 dan 2006/2007

NO	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN PELAJARAN	
			2005/2006	2006/2007
1.	Jumlah penduduk 7 – 12 tahun	Orang	274.238	274.909
2.	Jumlah siswa seluruhnya	Orang	293.737	294.588
	- SD	Orang	265.853	266.458
	- MI	Orang	27.884	28.130
3.	Jumlah siswa 7 – 12 tahun	Orang	260.715	261.932
	- SD	Orang	235.968	237.034
	- MI	Orang	24.755	24.878
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	107,11	107,16
5.	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	95,07	95,28

Tabel. 2
Perkembangan Jumlah APK dan APM SLTP/MTs
Di Kal-Teng Tahun Pelajaran 2005/2006 dan 2006/2007

NO	KOMPONEN	SATUAN	SATUAN PELAJARAN	
			2005/2006	2006/2007
1.	Jumlah penduduk 13-15 tahun	Orang	120.386	121.991
2.	Jumlah siswa seluruhnya	Orang	82.109	83.569
	- SLTP	Orang	65.573	66.130
	- MTs	Orang	16.536	17.439
3.	Jumlah siswa 13-15 tahun	Orang	80.536	82.230
	- SLTP	Orang	63.962	65.353
	- MTs	Orang	16.574	16.877
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	68,20	68,50
5.	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	66,90	67,41

Sumber: www.plp.co.id (Online 23 Oktober 2008)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah APK untuk SD/MI di Kalteng, pada tahun pelajaran 2005/2006 adalah 107,11 dan pada tahun pelajaran 2006/2007 meningkat menjadi 107,16, ini berarti banyak siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah yang sudah masuk sekolah. Jika dilihat bahwa jumlah

siswa yang berusia 7-12 tahun pada tahun 2005/2006 adalah 260.715 sedangkan jumlah siswa seluruhnya baik SD atau MI pada tahun pelajaran 2005/2006 adalah 293.737, ini berarti ada 33.022 siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah.

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai, untuk APK SD/MI pada tahun pelajaran 2005/2006 di Pesisir Pantai Kumai adalah 50,16% dan APK SLTP/MTs 27,65 %.

Tabel. 3

**APK SD/MI dan APK SLTP/MTs di Pesisir Pantai Kumai
Kecamatan Kumai Tahun Pelajaran 2005/2006**

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1.	Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	Orang	1561
2.	Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun	Orang	1027
3.	Jumlah siswa SD/MI	Orang	783
4.	Jumlah siswa SLTP	Orang	284
5.	APK SD/MI	%	50,16
6.	APK SLTP/MTs	%	27,65

Sumber Data: Data Disdikpora Kecamatan Kumai

Ini berarti bahwa masih banyak anak yang tidak sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Pesisir Pantai Kumai.

Bertolak keadaan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak apakah program wajib belajar pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah sudah dilaksanakan di daerah pesisir pantai Kumai dengan mengangkat judul **PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan lebih lanjut dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa program-program pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar yang dilaksanakan di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apa upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat?
4. Bagaimana peran serta masyarakat Pesisir dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program-program pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar yang dilaksanakan di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Untuk mengetahui peran serta masyarakat pesisir dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pendidik tentang pentingnya pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib belajar pendidikan dasar sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar.
4. Sebagai upaya pengembangan wawasan berfikir, menambah pengetahuan dan melatih daya analisis dalam melihat suatu masalah.

E. Sistematika Pembahasan

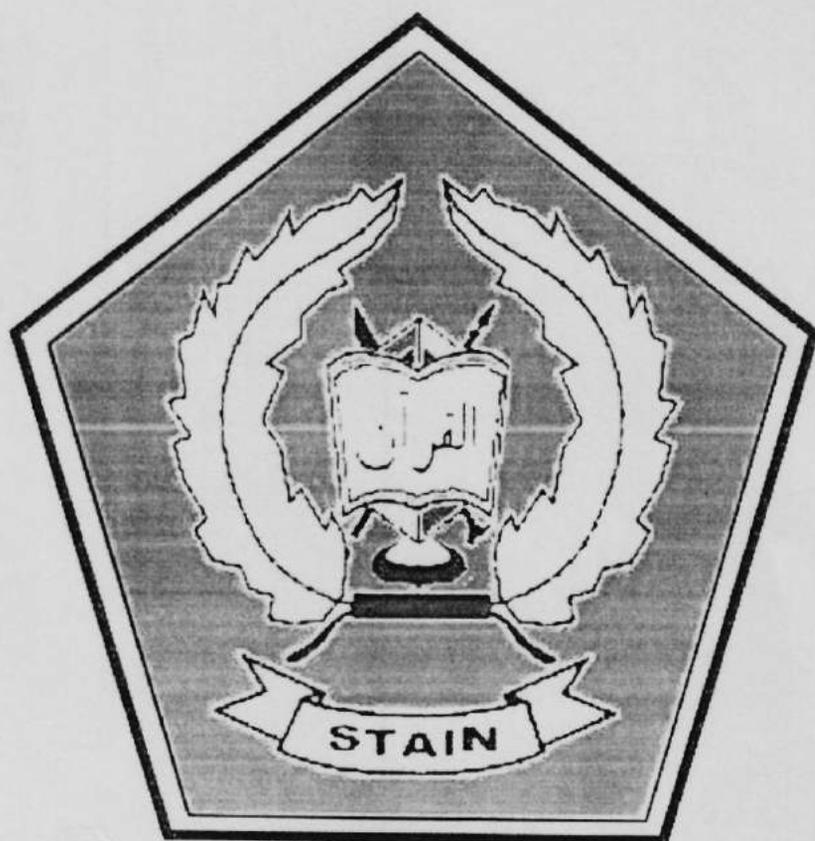
Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I, penulis memaparkan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II (Kajian Pustaka), peneliti memaparkan hal-hal yang mendasar dan mengarah ke jalan pikiran untuk menelusuri uraian pokok permasalahan. Oleh karena itu, dalam bab ini membahas tentang: pengertian wajib belajar pendidikan dasar, tujuan pendidikan dasar, jenjang pendidikan dasar, tujuan dan fungsi wajib belajar, kendala-kendala pada pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, upaya dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, pengertian masyarakat, pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada masyarakat.
3. Bab III, peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan subjek penelitian, latar penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.
4. Bab IV, peneliti menggali tentang bagaimana pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar pada masyarakat di pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai, kendala-kendala apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar serta upaya-upaya dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Bab V, penulis mengumpulkan isi skripsi ini ke dalam beberapa kesimpulan menyeluruh, serta penulis melengkapi dengan berbagai saran yang dianggap perlu untuk diperhatikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Wajib belajar Pendidikan Dasar diselenggarakan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dasar.

Dalam *Bunga Rampai Kebijakan Teknis Pembinaan Usaha Kewajiban Belajar* dikemukakan bahwa:

Wajib belajar adalah kewajiban bagi pemerintah bersama orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar bagi anak usia 7-15 tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kewajiban bagi anak tersebut untuk memanfaatkannya dalam usaha untuk memperoleh hak dan pengajaran nya.⁵

Kemudian Usman menyatakan bahwa:

Pendidikan Dasar adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan Nasional. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lama 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau satuan Pendidikan yang sederajat.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) bab IV tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kedua pasal 17 dinyatakan bahwa:

⁵ Depdikbud, *Bunga Rampai kebijakan teknik pembinaan kewajiban Belajar*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar, 1994, h 47

⁶Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002 h. 143.

- a. Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wajib belajar pendidikan dasar merupakan kewajiban pemerintah bersama orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar bagi anak usia sekolah yang lamanya 9 tahun, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

2. Tujuan Pendidikan Dasar

Usman menyatakan bahwa:

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar pada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah.⁸

Hal senada diungkapkan Umar bahwa:

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar, di samping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.⁹

⁷Peraturan Pemerintah, Standar Nasional Pendidikan, Bab IV Pasal 17.

⁸Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hl. 144.

⁹Umar Tirtaraharja dan L. Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 265.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di sekolah dasar bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar "baca-hitung", pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

Pendidikan dasar yang diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah dasar yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangan serta mempersiapkan mereka mengikuti pendidikan menengah.

3. Jenjang Pendidikan Dasar

Jenjang pendidikan dasar yang pertama ditempuh oleh anak adalah di Sekolah Dasar (SD) kemudian dilanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Selain sekolah dasar dan SLTP, lembaga pendidikan yang lain adalah Madrasah, yaitu MI (Madrasah Ibtidaiyah) sejajar dengan SD dan MTs (Madrasah Tsanawiyah) sejajar dengan SLTP.

a. Pengertian Sekolah Dasar

1) Pengertian Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu

6 tahun, mulai dari kelas I sampai kelas 6, pada umumnya anak masuk sekolah dasar pada umur 7 tahun.

Pendidikan di sekolah dasar bertujuan agar siswa memiliki kemampuan dasar baca, tulis dan hitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Menurut Beeby ada tiga fungsi sekolah dasar, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan kepada tiap murid untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan calon terbaik untuk mendapat pendidikan ke tingkat lebih lanjut.
- b. Menyiapkan jumlah lulusan SD yang cukup untuk mengisi bangku sekolah lanjutan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Menyiapkan mereka yang tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan untuk terjun ke masyarakat dan lapangan kerja, membuat mereka siap mengikuti pendidikan dan lapangan kerja, membuat mereka siap mengikuti pendidikan dan latihan luar sekolah dan mendorong mereka menggunakan kesempatan ini.¹⁰

Jadi sekolah dasar adalah lembaga pendidikan formal pertama yang dimasuki anak selama 6 tahun untuk menempuh ke jenjang pendidikan berikutnya yaitu di SLTP.

2) Struktur Kurikulum Sekolah Dasar

Struktur kurikulum sekolah dasar meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI.

¹⁰Beeby, *Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bagian Penerbitan LP3S, 1982, h. 200.

Tabel. 4
PROGRAM KURIKULUM SEKOLAH DASAR

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU			
	I	II	III	IV, V dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				
JUMLAH	26	27	28	32

Sumber: Standar Nasional Pendidikan

Keterangan : Untuk kelas I, II dan III jumlah jam pelajarannya diatur sesuai dengan kebijakan sekolah.

3) Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Dasar

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap pendidikan. Standar kompetensi lulusan Sekolah Dasar bertujuan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut, yang isinya adalah:

- a) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.
- b) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
- c) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.
- d) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.
- e) Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis dan kreatif.
- f) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif dengan bimbingan guru/ pendidik.

- g) Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.
- h) Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
- i) Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.
- j) Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- k) Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.
- l) Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.
- m) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.
- n) Berkomunikasi secara jelas dan santun.
- o) Bekerjasama dalam kelompok, tolong menolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
- p) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.
- q) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dan berhitung.¹¹

b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

1) Pengertian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah Sekolah Dasar (SD). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas VII sampai kelas IX.

Pendidikan di SLTP bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar yang merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di SD. Untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan perkembangannya serta mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat atau mengikuti pendidikan menengah.

¹¹Standar Pendidikan Nasional, Bandung: Fokus Media, h. 126-127.

2) Struktur Kurikulum SLTP

Standar kurikulum SLTP meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Tabel. 5
PROGRAM KURIKULUM SLTP

KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	4	4	4
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2	2	2
JUMLAH	32	32	32

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Tahun 2006 SNP

3) Standar Kompetensi Lulusan SLTP

Standar kompetensi di sekolah menengah pertama bertujuan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti lebih lanjut, yang isinya antara lain:

- Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja.
- Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
- Menunjukkan sikap percaya diri.

- d) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas.
- e) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam lingkungan nasional.
- f) Mencari dan menerapkan informasi tentang lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis dan kreatif.
- g) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif dan inovatif.
- h) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- i) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
- j) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial.
- k) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggungjawab.
- l) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tewujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- m) Menghargai karya seni dan budaya nasional.
- n) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan berkarya.
- o) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.
- p) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun.
- q) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat.
- r) Menghargai adanya perbedaan pendapat.
- s) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana.
- t) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana.
- u) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah.¹²

c. Madrasah

Menurut SKB 3 Menteri yang dikutip oleh Hasbullah, Madrasah adalah: lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, di samping mata pelajaran umum.¹³

¹²Standar Pendidikan Nasional, Bandung: Fokus Media, h. 127-128.

¹³Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999, h. 74.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah suatu lembaga pendidikan yang berdasarkan agama Islam. Dimana mata pelajaran agama Islam yang diajarkan pada sekolah tersebut lebih banyak dari sekolah umum.

Di antara jenjang pendidikan madrasah adalah: Madrasah Ibtidaiyah yang sejajar dengan SD dan Madrasah Tsanawiyah yang sejajar dengan SLTP.

1) Madrasah Ibtidaiyah

a) Tujuan Madrasah Ibtidaiyah

Tujuan Madrasah Ibtidaiyah adalah tujuan pendidikan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah dan atau mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.¹⁴

b) Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah

Isi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah menurut mata pelajaran dan alokasi waktu sebagaimana tabel sebagai berikut:

¹⁴Dpag RI, 1996/1997, h. 4-5.

Tabel. 6
PROGRAM KURIKULUM MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU			
		I	II	III	IV, V dan VI
1	2	3	4	5	6
1.	Mata Pelajaran				
	a. PAI	6	6	6	8
	b. PPKN	2	2	2	2
	c. Bahasa Indonesia	4	4	8	6
	d. Bahasa Arab	-	-	-	6
	e. Matematika	4	4	8	6
	f. IPA	2	2	4	4
	g. IPS	2	2	4	4
	h. Seni Budaya dan Keterampilan	2	2	2	2
	i. Penjaskes	2	2	2	2
2.	Muatan Lokal*)	2	2	2	2
3.	Pengembangan Diri**)	2	2	2	2*)
	JUMLAH	28	28	40	38

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, th. 2006 Depag RI

Menurut tabel program kurikulum di atas menunjukkan bahwa kelas I memiliki 28 jam belajar, kelas II, kelas III memiliki 40 jam belajar, sedangkan IV, V dan VI memiliki belajar 38 jam.

2) Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, sebagai lanjutan SD/MI atau bentuk lainnya sederajat.

a) Tujuan Madrasah Tsanawiyah

Tujuan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah yang tertuang dalam kurikulum pendidikan dasar berciri khas agama Islam adalah untuk:

Memberikan bekal kemampuan dasar sebagai perluasan dan peningkatan pengetahuan agama dan atau keterampilan yang diperoleh di Madrasah Tsanawiyah atau sekolah menengah pertama yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim, anggota masyarakat dan warga negara sesuai dengan tingkat perkembangannya serta mempersiapkan mereka untuk hidup dalam masyarakat.¹⁵

b) Kurikulum Madrasah Tsanawiyah

Isi kurikulum Madrasah Tsanawiyah memuat mata pelajaran dan alokasi waktu sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 7
SUSUNAN PROGRAM KURIKULUM
MADRASAH TSANAWIYAH

NO	KOMPONEN	KELAS DAN ALOKASI WAKTU		
		VII	VIII	IX
1	2	3	4	5
1.	Mata Pelajaran			
	a. Pendidikan Agama Islam	4	4	4
	b. PPKN	2	2	2
	c. Bahasa Indonesia	4	4	4
	d. Bahasa Arab	2	2	2
	e. Bahasa Inggris	4	4	4
	f. Matematika	4	4	4
	g. IPA	4	4	4
	h. IPS	4	4	4
	i. Seni Budaya dan Keterampilan	2	2	2
	j. Penjaskes	2	2	2
	k. TIK	2	2	2
2.	Muatan Lokal*)	2	2	2
3.	Pengembangan Diri**)	2*)	2*)	2*)
JUMLAH		36	36	36

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar 2006, Depag RI.

¹⁵Depag RI, 2005, h. 19.

4. Tujuan dan Fungsi Wajib Belajar

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2008, pasal 1 dijelaskan bahwa:

1. Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
2. Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹⁶

Di samping itu juga belajar pendidikan dasar diselenggarakan dengan sebaik-baiknya agar terwujud pemerataan pendidikan dasar yang bermutu sampai menjangkau penduduk di daerah terpencil.

Implementasi program wajib belajar pendidikan dasar (anak usia 7-15 tahun) bagi berjuta-juta anak didik yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan berbagai kondisi atau status sosial, ekonomi, budaya, serta geografisnya memerlukan pemikiran, perencanaan yang matang dan biaya yang tidak sedikit agar mencapai tujuan dan sasaran.

Ketika dideklarasikan pada tahun 1994, program wajib belajar pendidikan dasar dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat dicapai.

Untuk itu program wajib belajar pendidikan dasar dilakukan untuk merespon berbagai masalah dan tantangan sebagai berikut:

1. Jumlah anak usia 7-13 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih cukup tinggi (sekitar 2,9 juta). Di dalamnya termasuk anak yang putus sekolah di SD/ MI yang tidak melanjutkan ke SLTP/ MTs.

¹⁶Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Jakarta: BP. Ciptajaya, 2009.

2. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Pada tahun 2001/ 2002 jumlah siswa yang putus sekolah di SD/MI sebanyak 638.056 orang, sementara untuk SLTP/ MTs sebanyak 288.787 orang.
3. Angka mengulang kelas juga cukup tinggi. Pada tahun 2001/2002 jumlah siswa yang mengulang kelas di SD/MI sebanyak 1.388.153 orang, sedangkan di SLTP/MTs sebanyak 27.253 orang.
4. Mutu pendidikan dasar masih rendah, yang ditunjukkan oleh rendahnya prestasi siswa, rasio-guru (khususnya di daerah tertentu), rasio siswa-kelas, rasio kelas-ruang kelas, rasio laboratorium-sekolah, tingkat kelayakan guru dan kondisi gedung sekolah.

Program wajib belajar pendidikan dasar dengan mutu baik, diharapkan dapat dituntaskan pada tahun 2008/2009, dengan rincian:

1. Angka partisipasi kasar SLTP/MTs/setara diharapkan mencapai minimal 95%, dengan layanan baik sesuai dengan standar pelayanan minimal.
 2. Pendapat kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, sehingga angka partisipasi kasar untuk siswa perempuan di SLTP/MTs/setara mencapai 95 %.
 3. Layanan pendidikan dasar berjalan dengan baik, sehingga angka mengulang kelas di SD/ MI maksimal 1 %, SLTP/MTs maksimal 0,28 %, angka putus sekolah di SD/ MI maupun SLTP/MTs mencapai 99 %, angka kelulusan di SD/ MI minimal 99 % dan di SLTP/MTs minimal 97 %.
 4. Meningkatkan prestasi siswa secara bertahap, nasib siswa-guru diharapkan mencapai 18 untuk SD/MI dan mempertahankan angka 16 untuk SLTP/ MTs seperti yang telah dicapai saat ini rasio siswa – kelas 35, rasio kelas-ruang kelas 1, rasio laboratorium-sekolah 100 %, tingkat kelayakan guru 80 % dan kondisi gedung sekolah yang rusak berat maksimal 1 %.¹⁷
- 5. Kendala-Kendala pada Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar**

Program wajib belajar pendidikan dasar telah berlangsung hampir selama 14 tahun terhitung sejak dicanangkan Presiden pada 2 Mei 1994 yang lalu. Namun pada pelaksanaannya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat program tersebut. Selama 14 tahun perkembangan AT (Angka Transisi) dan AP (Angka Partisipasi) berlangsung sangat lamban. Ada sejumlah kendala yang selama ini telah dikenali, masing-masing adalah

¹⁷Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, *Pelangi Pendidikan*, Jakarta, h. 25.

kendala sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah, kendala kesadaran masyarakat yang juga rendah, masih terbatasnya daya tampung lembaga-lembaga pendidikan SLTP yang ada serta faktor efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah.

a. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi maksudnya di sini adalah keadaan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah yang akan berpengaruh pada pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.

Suyanto menyatakan bahwa:

Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum seluruhnya menggembirakan. Data menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1996 (menjelang krisis ekonomi) jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,4 juta dan kemudian berkembang menjadi 79,4 juta setelah memasuki krisis ekonomi pada tahun 1998.¹⁸

Pada masyarakat yang tergolong kurang mampu tersebut prioritas utama tentulah bukan pendidikan yang harus diberikan kepada putra-putrinya. Mereka lebih mengutamakan aspek pangan sehingga banyak lulusan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian kehilangan kesempatan menikmati pendidikan di tingkat SLTP.

Kondisi sosial ekonomi tersebut akan mengalirkan akibat yang berantai ke dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat SLTP. Mereka yang saat ini sedang menikmati pendidikan di SLTP pun banyak yang terancam putus sekolah. Semakin terbatasnya anggaran yang dimiliki sekolah karena menurunnya kontribusi orang tua siswa menanggung

¹⁸Suyanto dan Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 182.

sebagian beban pendidikan (baik yang disalurkan melalui BP3 di sekolah atau yang langsung dimanfaatkan oleh siswa) akan berpengaruh pula pada kelancaran proses pembelajaran. Bila hal itu terjadi, maka akan banyak siswa yang berdaya serap rendah sehingga dimungkinkan tidak naik kelas atau tidak lulus. Rasio masa belajar siswa akan semakin panjang, mereka tidak dapat selesai tepat dalam waktu tiga tahun. Dan ini berarti tambahan beban biaya bukan hanya ditanggung oleh orang tua siswa tetapi juga oleh pemerintah.

Dewasa ini biaya pendidikan cukup tinggi sehingga rakyat kecil sulit untuk menjangkaunya. Karena itu banyak orang tua yang tidak sanggup membiayai sekolah anaknya. Masalahnya kekurangan biaya ini disebabkan karena keadaan ekonomi keluarga anak yang miskin.

b. Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah

Tingkat kesadaran masyarakat dirasakan sekarang ini masih rendah, kondisi saat ini dirasakan belum terlalu jauh berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Saat ini masih ada orang tua yang beranggapan bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu saja. Anak perempuan, kata orang tua kalau sudah pandai mengaji dan membaca surat kabar sudah cukup. Yang harus mereka lakukan kemudian, belajar menjadi ibu rumah tangga. Artinya bisa mencuci pakaian dan memasak. Anak laki-laki diberi kesempatan lebih jauh sampai tamat SLTP. Alasannya, anak laki-lakilah yang harus cari nafkah, sehingga perlu bisa bergaul dengan segala lingkungan. Untuk itu SLTP dianggap cukup. Yang kemudian harus

dilakukan anak-anak itu adalah membantu ayahnya menunggu warung, mencari dagangan di pasar, membantu menjual hasil kebun dan belajar bagaimana membuat tembok. Pelajaran seperti itulah yang dianggap langsung ada gunanya, daripada duduk di SLTA Cuma membuang uang.

Pendapat-pendapat seperti itu masih sering didengar dari masyarakat. Masyarakat tidak melihat lagi nilai guna pendidikan secara praktis dalam kehidupan nyata. Mereka lebih memenpentingkan mencari uang daripada sekolah.

c. Keterbatasan Daya Tampung SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) merupakan sekolah lanjutan setelah sekolah dasar. Bagi yang sudah lulus sekolah dasar wajib menempuh pendidikan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Tapi karena terbatasnya jumlah SLTP apalagi untuk daerah terpencil jarang di tiap kecamatan ada SLTP yang lebih dari satu buah. Maka siswa lulusan SD banyak yang tidak tertampung di SMP.

Keminiman gedung sekolah merupakan kendala penting yang harus segera dibenahi. Makin sedikit jumlah gedung SLTP semakin banyak siswa lulusan sekolah dasar yang tidak tertampung di SLTP.

d. Ketidakefisienan Pengelolaan Pendidikan di Sekolah

Faktor ini sangat berpengaruh pada percepatan target wajib belajar pendidikan dasar. Penambahan daya tampung dan sekaligus pertambahan jumlah siswa baru hampir tidak mempunyai makna yang signifikan pada kenaikan AT dan AP karena pada waktu yang hampir bersamaan terjadi

siswa putus sekolah atau keluar dari jaringan sekolah. Mungkin mereka putus sekolah karena faktor ketiadaan biaya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan karena proses pembelajaran yang kurang menyenangkan sehingga tumbuh rasa bosan, dan akhirnya keluar dari sekolah.

6. Usaha/ Upaya dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar dititikberatkan pada 3 sektor yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dasar dan peningkatan efisiensi pendidikan.

a. Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar

Untuk menambah daya tampung sekolah sehingga lebih memberikan kesempatan kepada calon siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan maka pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain mengadakan pembangunan UGB (Unit Gabungan Baru), USB (Unit Sekolah Baru) yang ditujukan bagi wilayah/ daerah terpencil.

Seperti yang dikemukakan Direktorat PLP bahwa:

USB adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana pendidikan dengan mendirikan sekolah baru di kantong-kantong daerah yang angka partisipasi kasarnya di bawah rata-rata.¹⁹

Selain mengadakan pembangunan USB untuk memperluas kesempatan belajar pemerintah juga memberdayakan dan mengkonsolidasikan pengembangan TK pedesaan, SD kecil, SD kunjung,

¹⁹Direktorat PLP, *Pelangi Pendidikan*, h. 24.

SLTP terbuka dan meningkatkan program pendidikan luar sekolah, seperti kejar paket A, kejar paket B dalam mengatasi banyak anak yang belum tertampung pada jenjang pendidikan formal.

b. Peningkatan Mutu Pendidikan

Umar dan La Sula menyatakan bahwa:

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan.²⁰

Untuk meningkatkan kualitas dasar pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain membenahi pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar, memberikan pendidikan kecakapan hidup kepada siswa pendidikan dasar, meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan, pengadaan guru kontrak untuk mengatasi kekurangan guru.

c. Peningkatan Efisiensi Pendidikan

Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi, jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah.

²⁰Umar Tirtoraharjo dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, h. 233.

Menurut Umar bahwa:

Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah:

- 1) Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan.
- 2) Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan.
- 3) Bagaimana pendidikan diselenggarakan.
- 4) Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga.²¹

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut pemerintah mengadakan berbagai upaya yang dapat meningkatkan efisiensi pendidikan antara lain penempatan tenaga guru disesuaikan dengan bidang studi, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang bisa dimanfaatkan. Pemerintah juga mengadakan program beasiswa dan pemberian dana bantuan operasional sekolah.

7. Masyarakat

Arifin menyatakan bahwa: Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.²²

Masyarakat juga merupakan lingkungan pendidikan. Menurut konsep sosiologi, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dan saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan.

Bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah kumpulan banyak orang dengan berbagai kualitas diri, mulai yang tidak berpendidikan sampai berpendidikan tinggi. Ia adalah merupakan wahana atau tempat para anggotanya mengenalkan keahliannya maupun mengambil pelajaran. Baiknya kualitas masyarakat ditentukan oleh pendidikan para anggotanya. Baiknya

²¹ *Ibid.*, h. 234.

²² Arifin Nur, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997, h. 85

kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya.

Anggota masyarakat terdiri dari berbagai pendidikan, profesi, keahlian, suku, budaya, agama dan tingkat sosial sehingga menjadi majemuk. Seperti halnya, masyarakat pesisir Pantai Kumai yang terdiri dari berbagai profesi ada yang berjualan, nelayan, guru dan ada juga yang menjadi pengangguran. Tingkat pendidikannya pun bermacam-macam, ada yang tamatan SD, SLTP dan SLTA. Bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah.

Masyarakat merupakan lembaga ketiga sebagai lembaga sendiri besar sekali peranannya. Bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat yang ada. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, jangan diharapkan pendidikan dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh karena itu, sebagai satu lingkungan terjadinya kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan.

Hasbullah menyatakan bahwa peran masyarakat terhadap pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah,
2. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat,

3. Masyarakat lah yang ikut menyediakan tempat pendidikan seperti gedung-gedung, museum, perpustakaan, panggung-panggung kesenian, kebun binatang dan sebagainya,
4. Masyarakat lah yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Mereka dapat diundang ke sekolah untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu masalah yang sedang dipelajari anak didik. Orang-orang yang punya keahlian khusus banyak sekali terdapat di masyarakat seperti petani, saudagar, polisi, dokter dan sebagainya,
5. Masyarakat lah sebagai sumber pelajaran atau laboratorium tempat belajar.²³

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

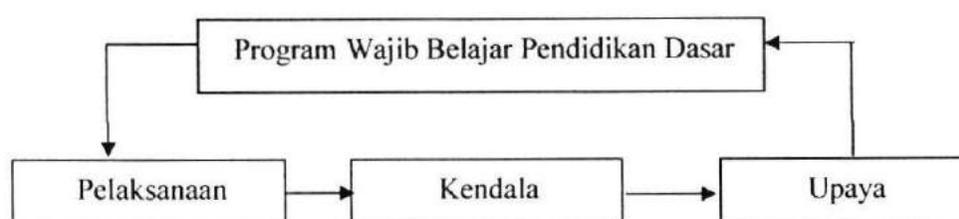
Setelah mengkaji pendapat pakar di atas, kiranya dalam penelitian ini perlu dirumuskan berupa kerangka pikir, guna memudahkan peneliti sendiri dalam pembuatan skripsi ini.

Secara keseluruhan bahwa yang dimaksud wajib belajar pendidikan dasar adalah kewajiban pemerintah bersama orang tua dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi anak usia sekolah yang lamanya 9 tahun, 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

²³ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 100

Pemerintah wajib mengupayakan anak-anak usia sekolah pendidikan dasar (7-15 tahun) untuk masuk sekolah. Dengan mengadakan berbagai upaya yang dapat menunjang suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar tersebut. Dalam hal ini pemerintah (Dinas Pendidikan dan Pengajaran) baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan sangat berperan penting dalam program wajib belajar pendidikan dasar dengan tidak mengesampingkan peran serta dari masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan program wajib belajar pendidikan dasar pemerintah banyak mengalami kendala-kendala yang menghambat program tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di daerah pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar banyak sekali anak-anak yang putus sekolah baik di SD maupun di SLTP dan banyak yang mengulang. Mungkin hal ini terjadi karena berbagai faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah. Melihat keadaan tersebut pemerintah wajib mengupayakan agar mereka dapat mengikuti pendidikan dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di bagan berikut:



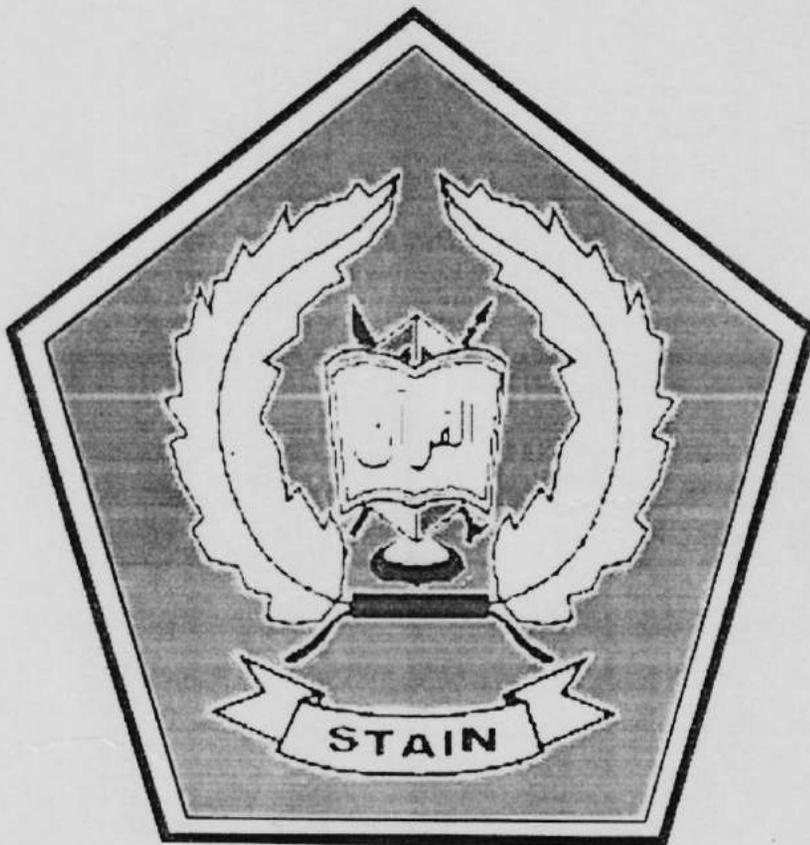
2. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian kerangka pikir di atas, maka timbullah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana kondisi masyarakat di Daerah Pesisir Pantai Kumai, Kecamatan Kumai.
- b) Apa program-program pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai.
- c) Apa kendala-kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai.
- d) Bagaimana peran serta masyarakat pesisir dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.

BAB III

METODE PENELITIAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan selama dua bulan. Namun apabila ternyata dalam waktu tersebut data yang diperlukan belum lengkap, maka akan diadakan perpanjangan waktu penelitian dengan waktu yang tidak ditentukan sampai seluruh data yang diperlukan benar-benar terkumpul.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari 5 desa pesisir yaitu Kubu, Keraya, Teluk Bogam, S. Bakau dan Sebuai.

B. Pendekatan dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²⁴

²⁴Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 30.

Dalam hal ini Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, objek yang diteliti ialah objek yang benar apa adanya, tidak ada manipulasi dari peneliti. Jadi sejak peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah. Selain itu, peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai, Penilik Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kecamatan Kumai, untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga menggali data dari pengajar baik guru maupun tutor yang bertugas di daerah pesisir serta masyarakat yang ada di wilayah pesisir pantai Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dijadikan sebagai informan pendukung..

Untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga menggali data dari guru baik Sekolah Dasar maupun SLTP serta masyarakat yang ada di wilayah pesisir pantai Kumai Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dijadikan sebagai informan pendukung.

²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005, h.1.

C. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh, yaitu melalui sumber informan, peristiwa dan dokumen.

Sedangkan jenis datanya adalah:

1. Data tertulis, yaitu informasi yang diperoleh dari tulisan, arsip, dokumentasi, laporan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Data tidak tertulis, yaitu semua keterangan yang tidak tertulis, diperoleh melalui observasi dan wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk mengungkap tujuan penelitian ini.

1. Teknik observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas tentang objek yang sedang diteliti. Dalam pengembangannya observasi berarti "observasi ialah pengamatan, peninjauan secara cermat".²⁶ Observasi juga dilakukan bila belum banyak keterangan tentang masalah yang kita selidiki, observasi diperlukan untuk menjajaknya. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.

²⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h. 699.

Menurut Margono menyatakan “Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.²⁷

Jadi observasi adalah pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala peristiwa serta masalah-masalah yang diteliti, seperti:

- a. Kondisi/ keadaan masyarakat di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai.
- b. Mata pencaharian masyarakat pesisir.
- c. Kondisi sarana pendidikan (gedung sekolah SD maupun SLTP).
- d. Sarana transportasi sebagai sarana penunjang.
- e. Pelaksanaan kejar Paket A dan B.

2. Teknik wawancara

Moleong menyatakan bahwa:

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan awaban atas pertanyaan itu.²⁸

Di samping itu menurut Sugiyono menyatakan “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.²⁹

²⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 158.

²⁸Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 135.

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 72.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan teknik wawancara adalah, untuk memperoleh keterangan lisan melalui bercakap-cakap, bertatap *muka* dengan orang yang memberikan keterangan si peneliti, wawancara ini untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, meliputi:

- a. Apa saja program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar.
 - 1) Program pendidikan luar sekolah (Kejar Paket A dan B).
 - 2) Pembangunan ruang kelas baru.
 - 3) Pembangunan SD SLTP satu atap.
- b. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.
 - 1) Kesadaran masyarakat.
 - 2) Lokasi sekolah baik SD/MI dan SLTP/MTs dengan rumah penduduk.
 - 3) Sarana transportasi.
 - 4) Masalah tenaga pengajar.
 - 5) Waktu pelaksanaan.
- c. Apa saja upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.
 - 1) Sosialisasi peningkatan mutu pendidikan dasar.
 - 2) Kebutuhan guru dan peningkatan mutu guru.
 - 3) Sarana dan prasarana pendidikan.

d. Bagaimana peran masyarakat terhadap program wajib belajar pendidikan dasar.

- 1) Apakah masyarakat mendukung program wajib belajar pendidikan dasar.
- 2) Apa bentuk peran serta masyarakat.
 - Ikut mensosialisasikan.
 - Penyediaan sarana dan prasarana.
 - Penyumbang dana.

3. Teknik Dokumentasi

Pengertian dokumentasi bagi orang awam berarti foto atau gambar, namun sebenarnya dokumentasi memiliki arti yang lebih dari itu.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dinyatakan bahwa:

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan (seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian), barang cetakan yang dikirim melalui pos, rekaman suara, gambar, film, yang dapat dijadikan bukti keterangan. Sedangkan dokumentasi pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan atau pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.³⁰

Senada dengan itu, menurut Moleong bahwa "dokumen ialah setiap bahan yang tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik."³¹

Lebih lanjut menurut Sugiyono menyatakan bahwa:

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, dokumen

³⁰Depdikbud, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 240.

³¹Moleong, *Metode Penelitian*, h. 161.

yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa patung, film dan lain-lain.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah catatan-catatan penting dari suatu peristiwa-peristiwa atau seseorang yang digunakan sebagai bukti keterangan yang berupa foto, catatan biografi, film, rekaman suara dan lain-lain, sedangkan dokumentasi pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan informasi di bidang pengetahuan atau pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan.

Adapun data yang diambil dari teknik ini adalah:

- a. Data jumlah penduduk Daerah Pesisir
- b. Data jumlah penduduk usia 7-12 tahun
- c. Data jumlah penduduk usia 13-15 tahun.
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.
- e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP/MTs.
- f. Data jumlah SD Daerah Pesisir
- g. Data jumlah MI. Daerah Pesisir
- h. Data jumlah lulusan SLTP/ MTs Daerah Pesisir
- i. Data jumlah siswa SD Daerah Pesisir
- j. Data jumlah siswa MI Daerah Pesisir
- k. Data jumlah siswa SLTP Daerah Pesisir
- l. Data jumlah kelompok kejar paket A di pesisir
- m. Data jumlah kelompok kejar paket B di pesisir
- n. Data jumlah tutor kejar paket A dan B di pesisir

³²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 82.

E. Pengabsahan Data

Kredibilitas data dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai atau relevan dengan apa yang sesungguhnya ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti.

Untuk memperoleh keabsahan data, penulis berpedoman pada pendapat Moleong yang menyatakan bahwa "triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu".³³

Menurut Sugiyono berpendapat bahwa "triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu".³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Sedangkan dalam pelaksanaannya, triangulasi dilakukan dengan cara: (1) Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber, misalnya dari atasan, bawahan;

³³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h. 178.

³⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian*, h. 125.

(2) Triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner; (3) Triangulasi waktu, yaitu pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, misalnya pagi, siang, sore.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data akan diberi arti dan makna yang berguna untuk memecahkan masalah dalam penelitian.

Menurut pendapat Milles dan Hubberman yang dikutip oleh Abdul Qodir bahwa langkah-langkah analisis data yang ditempuh ada empat, yaitu:

1. Pengumpulan data (*collecting data*) dikumpulkan semua data yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat melalui pengamatan, wawancara, dokumen maupun pengumpulan benda/ barang, foto dan lain-lain yang kemudian diubah ke dalam bentuk tulisan-tulisan yang dapat di baca, dikode dan dianalisis.
2. Reduksi data (*data reduction*), data yang begitu banyak dan kompleks serta mungkin masih bercampur aduk yang diperoleh dari kancah penelitian ditajamkan, diseleksi, digolongkan, diarahkan, dibuang yang tidak relevan dan diorganisasikan dengan cara sedemikian rupa untuk pemecahan masalah atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian menyederhanakannya dan menyusunnya secara sistematis sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi/ disimpulkan.

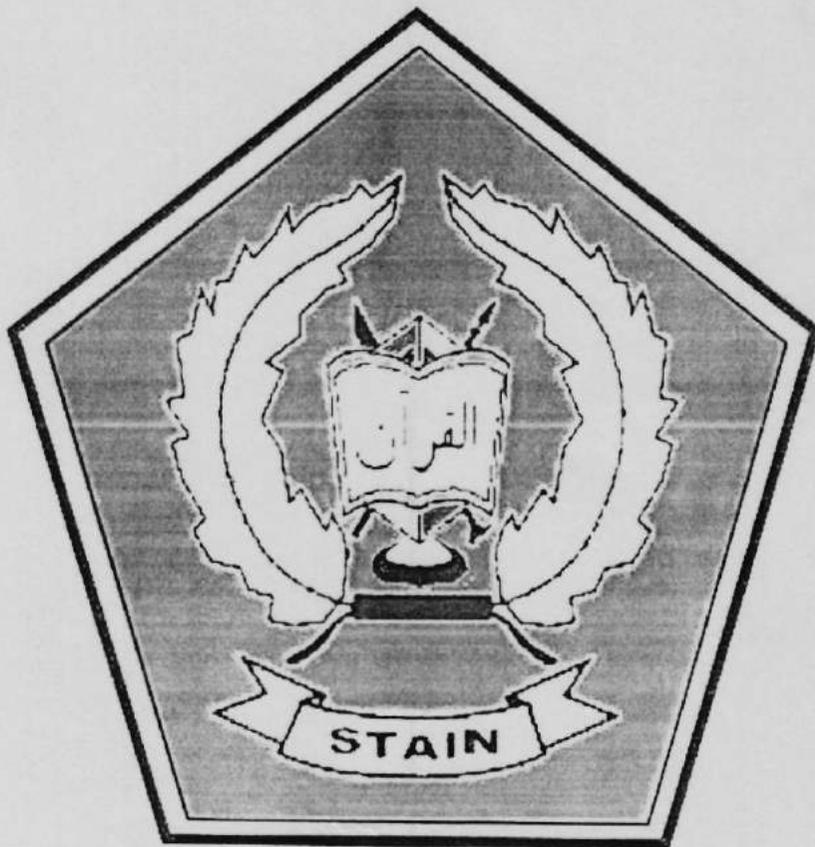
3. Pada penyajian data (*data display*) dikembangkan format berupa tabel ringkasan untuk menjelaskan dan menyederhanakan kekomplekan data agar menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca.
4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh, kemudian untuk laporan final harus diverifikasi yaitu dengan melihat kembali pada reduksi data maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.³⁵

Analisis ini dipandang relevan, karena data lapangan sebagian besar hasil observasi dan wawancara. Data dimaksud cukup banyak dan tidak seluruhnya disajikan, oleh karena itu mesti dilakukan pengurangan data sebelum disajikan.

³⁵Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya: t.n.p., 1999, h. 77.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi

Daerah pesisir pantai Kumai merupakan daerah yang terletak di kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Daerah ini terletak \pm 120 km dari kota. Daerah ini terdiri dari beberapa desa antara lain desa Kubu, Keraya, Teluk Bogam, Sungai Bakau dan Sebuai.

Daerah pesisir adalah daerah yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Pulai.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Cabang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pasir Panjang.

2. Kondisi Alam

Keadaan alam daerah pesisir sebagian besar adalah daerah pantai. Adapun keadaan alam desa sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. 8
KONDISI ALAM DAERAH PESISIR

No	Jenis Tanah	Jumlah / ha
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Tanah perumahan	391 ha
2.	Tanah perkebunan	52 ha
3.	Tanah fasilitas umum (tanah negara)	98 ha
4.	Tanah rawa	73 ha
5.	Tanah pasir	134 ha

Sumber: Dokumen Geografi Kecamatan Kumai tahun 2006

3. Penduduk Desa

Berdasarkan dokumen di kantor kecamatan Kumai sampai bulan Juli 2006 terdapat sebanyak 7899 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 9
DATA PENDUDUK DAERAH PESISIR

No	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Kubu	1863 jiwa
2.	Keraya	1591 jiwa
3.	Teluk Bogam	1186 jiwa
4.	Sungai Bakau	1541 jiwa
5.	Sebuai	1718 jiwa
Jumlah		7889 jiwa

Sumber: Dokumen Monografi Kecamatan Kumai tahun 2006

Tabel. 10
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA

No	Usia	Jumlah Penduduk
1.	17 tahun ke atas	4387 jiwa
2.	13 – 15 tahun	1098 jiwa
3.	7 – 12 tahun	1607 jiwa
4.	0 – 6 tahun	697 jiwa
Jumlah		7889 jiwa

Sumber: Dokumen Monografi Kecamatan Kumai tahun 2006

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia yang wajib masuk ke jenjang pendidikan dasar sebanyak 2705 jiwa.

4. Mata Pencarian Penduduk

Karena letak daerah pesisir di sepanjang pantai maka sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat banyak nelayan yang menjemur ikan hasil tangkapannya. Ada yang dikeringkan dan ada yang langsung mereka jual ke pasar. Tiap hari mereka pergi ke laut tapi penghasilannya tiap hari tidak sama karena tergantung juga pada musim. Bila musim barat hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan pada musim timur.

Pemerintah telah mengelola daerah ini sebagai obyek wisata pantai, terutama untuk desa Kubu, Keraya dan Teluk Bogam. Bila hari Minggu banyak para pengunjung yang datang ke pantai tersebut, hal ini dimanfaatkan penduduk sekitar untuk mencari pendapatan yaitu dengan berjualan, mulai

dari makanan dan minuman ringan, kerajinan dari kerang sampai warung makan.

5. Sarana

Pemerintah telah menyiapkan beberapa fasilitas umum yang menunjang kegiatan pemerintahan desa juga fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan.

Tabel. 11
SARANA UMUM MASYARAKAT

No	Sarana	Desa				
		Kubu	Keraya	Teluk Bogam	Sungai Bakau	Sebuai
1.	Kantor Kepala Desa	√	√	√	√	√
2.	Kantor BPD	√	√	√	√	√
3.	Kantor KUD	√	√	√	√	√
4.	Balai Desa	√	√	-	√	√
5.	Puskesmas	√	√	√	√	√

Sumber: Data Sarana Desa tahun 2008

Tabel. 12
SARANA IBADAH MASYARAKAT DESA

No	Sarana	Desa				
		Kubu	Keraya	Teluk Bogam	Sungai Bakau	Sebuai
1.	Masjid	√	√	√	√	√
2.	Mushola	√	√	-	√	√
3.	Gereja	√	-	√	√	√
4.	Wihara	-	-	-	-	-
5.	Pure	-	-	-	-	-

Sumber: Data Sarana Desa tahun 2008

Tabel. 13
SARANA PENDIDIKAN MASYARAKAT

No	Sarana	Desa				
		Kubu	Keraya	Teluk Bogam	Sungai Bakau	Sebuai
1	Gedung SD	2	1	1	1	2
2	Gedung MI	-	-	-	-	1
3.	Gedung SMP	1	-	-	-	-
4.	Gedung MTs	-	-	-	-	-

Sumber: Data Sarana Desa tahun 2008

B. Gambaran Umum Pendidikan Dasar di Daerah Pesisir

Dalam rangka pembinaan pendidikan dasar telah dilaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, meningkatkan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan dasar.

1. Keadaan Lembaga Pendidikan Dasar

a. Jumlah Sekolah Dasar di Pesisir

Jumlah SD di Daerah Pesisir dilihat secara keseluruhan berjumlah 7 (tujuh) SD yang terdiri dari SDN-1 Sebuai, SDN-2 Sebuai, SDN-1 Keraya, SDN-1 Sungai Bakau, SDN-1 Kubu, SDN-2 Kubu dan SDN-1 Teluk Bogam.

Untuk lebih menggambarkan mengenai jumlah sekolah dasar per desa di daerah pesisir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 14
KEADAAN SD PER DESA DI DAERAH PESISIR

No	Desa	Jumlah	Nama SD
1.	Kubu	2	SDN-1 Kubu SDN-2 Kubu
2.	Keraya	1	SDN-1 Keraya
3.	Sungai Bakau	1	SDN-1 Sungai Bakau
4.	Teluk Bogam	1	SDN-1 Teluk Bogam
5.	Sebuai	2	SDN-1 Sebuai SDN-2 Sebuai
Jumlah		7	

Sumber: Dokumen Jumlah SD pada Kantor Disdikpora Kumai

b. Jumlah MIN/MIS di Daerah Pesisir Pantai Kumai

MIN/MIS di Daerah Pesisir hanya ada 1 saja yaitu MIS B. Miftahul Aula Sebuai yang terletak di desa Sebuai.

Jumlah MIN/MIS di Kecamatan Kumai secara keseluruhan ada 5 yaitu MIN 1 Kumai terletak di Kumai Hilir, MIN 2 Kumai di Kumai Hulu, MIS B.Salam-1 di Kumai Hulu, MIS B Miftahul Ulum di Kumai Hilir dan MIS B. Miftahul Aula Sebuai di Sebuai.

c. Jumlah SLTP dan MTs di Daerah Pesisir Pantai Sebuai

Jumlah sekolah menengah pertama di Daerah Pesisir hanya ada 1 yaitu SMPN 4 Kumai yang terletak di desa Kubu.

Sedangkan MTs (Madrasah Tsanawiyah) di Daerah Pesisir tidak ada. MTs untuk Kecamatan Kumai berada di Kumai Hulu dan Kumai Hilir.

d. Jumlah Siswa SD di Daerah Pesisir

Dari data yang didapat pada kantor Dikjar kecamatan Kumai bahwa jumlah siswa SD di pesisir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 15
KEADAAN SISWA SD DI PESISIR PANTAI KUMAI

Nama SD	Murid Kelas												Jumlah		Jlh.
	I		II		III		IV		V		VI		L	P	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SDN-1 Kubu	18	27	24	30	28	25	14	15	18	17	9	17	111	131	242
SDN-2 Kubu	17	18	16	18	19	15	20	15	10	19	13	17	95	101	196
SDN-1 Keraya	7	6	6	2	7	7			9	6	3	8	32	29	61
SDN-1 Teluk Bogam	21	20	8	14	13	13	11	16	13	9	15	7	82	79	161
SDN-1 Sungai Bakau	27	18	15	23	30	22	21	20	16	19	13	16	122	118	240
SDN-1 Sebuai	3	3	8	2	2	6	2	5	4	4	6	5	25	25	50
SDN-2 Sebuai	1	2	2	3	3	6	-	5	6	4			12	20	32
Jumlah												479	503	982	

Sumber: Data Siswa pada Kantor Disdikpora Kumai Tahun 2008

Pada tabel di atas menunjukkan siswa terbanyak terdapat pada SDN-1 Kubu sebanyak 242 murid terdiri dari kelas I sebanyak 45 murid, kelas II 54 murid, kelas III 63 murid, kelas IV 29 murid, kelas V 35 murid dan kelas VI sebanyak 22 murid.

Sedangkan siswa yang paling sedikit terdapat pada SDN-2 Sebuai yang berjumlah 32 murid terdiri dari kelas I berjumlah 3 murid, kelas II 5 murid, kelas III 9 murid, kelas IV 5 murid, kelas V 10 murid dan kelas VI kosong.

e. Jumlah Siswa MI di Pesisir

Tabel. 16
KEADAAN SISWA MI DI PESISIR

Nama SD	Murid Kelas												Jumlah		Jlh
	I		II		III		IV		V		VI				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
MIS.B. Miftahul Aula Sabuai	9	4	6	4	7	4	3	5	6	2	3	8	34	27	61

Sumber: Data Siswa pada Kantor Disdikpora Kumai tahun 2008

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di MIS B Miftahul Aula Sebuai mempunyai jumlah murid sebanyak 61 terdiri dari kelas I sebanyak 13 murid, kelas II 10 murid, kelas III 11 murid, kelas IV 8 murid, kelas V 8 murid, dan kelas VI sebanyak 11 murid.

f. Jumlah Siswa SLTP di Pesisir

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di pesisir hanya ada I yaitu SMPN-4 Kumai. Dari data yang didapat pada kantor Dinas Dikjar Kecamatan Kumai bahwa jumlah siswa SMPN-4 Kumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 17
DATA SISWA SMPN-4 KUMAI

Kelas		Jumlah Kelas	Banyak Siswa		jumlah
			L	P	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	A	1	12	16	28
I	B	1	14	15	29
	C	1	14	20	34
Jumlah		3	40	51	91

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	A	1	12	23	35
II	B	1	15	21	36
	C	1	18	19	37
Jumlah		3	45	63	108
	A	1	15	21	36
III	B	1	14	18	32
	C	1	14	23	37
Jumlah		3	43	62	105

Sumber: Data Siswa pada Kantor Disdikpora Kumai tahun 2008

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di SMPN-4 Kumai memiliki jumlah murid secara keseluruhan 304 orang yang terdiri dari kelas I sebanyak 91 orang, kelas II sebanyak 108 orang dan kelas III sebanyak 105 orang.

2. Pelaksanaan Pendidikan Dasar Kecamatan Kumai

Dalam rangka pembinaan pendidikan dasar telah dilaksanakan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar, meningkatkan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan dasar.

KY menyatakan:

Pemerintah telah mengupayakan agar pelaksanaan program wajib belajar di kecamatan Kumai dapat segera dituntaskan terutama di daerah pedesaan seperti halnya di pesisir pantai Kumai. Mengingat daerah pesisir adalah daerah yang jauh dari perkotaan, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Maka dari itu kami tetap berusaha agar wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini dapat dituntaskan.³⁶

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya pemerintah telah berupaya agar program wajib belajar pendidikan dasar di daerah pesisir

³⁶ Wawancara dengan KY pada tanggal 06 Desember 2008.

dapat segera dituntaskan, karena daerah ini adalah daerah yang cukup jauh dari perkotaan. Dari observasi yang penulis lakukan terlihat masih banyak masyarakatnya yang hidup di bawah ketertinggalan, baik tempat tinggal maupun pendidikannya yang kurang layak.

a. Akses Pendidikan Dasar

Kondisi dan tingkat pencapaian pembangunan pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat dan orang tua meliputi angka partisipasi kasar, angka lulusan, angka putus sekolah, angka mengulang, angka melanjutkan dan tidak tertampung.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 18
TINGKAT PENCAPAIAN PENDIDIKAN DASAR

No	Keterangan	%
1	APK SD/MI	64,90%
2	APK SLTP/MTs	27,68%
3	Angka lulus SD/MI	88,88 %
4	Angka lulus SLTP/MTs	86,86 %
5	Angka putus sekolah SD/MI	2,75 %
6	Angka putus sekolah SLTP/MTs	2,15 %
7	Angka mengulang SD/MI	8,14 %
8	Angka mengulang SLTP/MTs	3,35 %
9	Angka anak SD/MI yang tidak tertampung	1 %
10	Angka anak SLTP/MTs yang tidak tertampung	6 %

Sumber: Dokumen Kantor Dinas Dikpora Kecamatan Kumai

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar SD/MI sebesar 64,90%. Ini berarti bahwa ada peningkatan nilai APK dari tahun ajaran 2005/2006 yaitu naik 14,74%, dari 50,16% menjadi 64,90%. Sedangkan APK untuk SLTP/MTs sebesar 27,68%. APK SLTP/MTs naik 0,3%. Angka anak SD/MI yang tidak tertampung 1% sedangkan untuk SLTP/MTs 6%. Mengingat bahwa jumlah SLTP di pesisir hanya ada 1 SLTP yaitu SLTP 4 Kumai sedangkan SD sudah cukup untuk menampung anak-anak yang bersekolah. Hal ini mempengaruhi Angka Transisi (AT) karena jumlah SLTP hanya ada 1 sedangkan SD ada 7 SD.

b. Mutu Pendidikan Dasar

Mutu pendidikan dasar diupayakan terus meningkat agar lulusan SD maupun SLTP bisa memasuki jenjang yang lebih tinggi. KY dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

“Siswa yang mengikuti ujian nasional harus mencapai nilai rata-rata diatas 5,85 untuk SD dan untuk SLTP mencapai nilai rata-rata 5,47. Bila tidak mencapai nilai tersebut dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang ujian.”³⁷

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian mutu pendidikan dasar adalah ujian nasional. Untuk tingkat sekolah dasar mencapai nilai rata-rata 5,85 dan untuk tingkat SLTP mencapai nilai rata-rata 5,50.

c. Tenaga Guru

Guru merupakan faktor utama dalam pendidikan, tanpa guru proses pendidikan tidak dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah

³⁷ Wawancara dengan KY pada tanggal 06 Desember 2008.

menjadi tujuan pendidikan. Guru sebagai seorang pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik atau murid.

Agar program wajib belajar pendidikan dasar cepat dituntaskan peranan guru cukup besar. Semakin banyak tenaga guru yang tersedia semakin cepat juga program wajar Dikdas dapat dituntaskan.

Seperti yang diungkapkan KY: "Untuk mendukung terlaksananya percepatan program wajib belajar pendidikan dasar di Kecamatan Kumai, kami masih banyak memerlukan tenaga pengajar, baik SD maupun SLTP".³⁸

Dari wawancara di atas menggambarkan keadaan tenaga guru di Kumai yang masih kekurangan untuk itu pemerintah telah mengupayakan agar kebutuhan tenaga pendidik di Kecamatan Kumai khususnya di daerah pesisir terpenuhi.

d. Sarana dan Prasarana

Mulyasa menyatakan bahwa: "Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan khususnya proses belajar mengajar".³⁹

Sarana pendidikan adalah alat yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media pengajaran.

³⁸Wawancara dengan KY pada tanggal 06 Desember 2008.

³⁹Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 49.

Sedangkan prasarana menurut Mulyasa adalah: “Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran”.⁴⁰

Jadi prasarana pendidikan adalah alat yang secara tidak langsung digunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, jalan menuju sekolah, taman sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya.

KY dalam wawancara mengungkapkan bahwa:

Kalau dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada maka kebutuhan ruang belajar sudah cukup. Tetapi, kalau dilihat dari lokasi pemukiman penduduk terutama yang di daerah terpencil, maka masih memerlukan tambahan ruang kelas berikut mubilernya. Buku yang masih sangat kurang karena tidak meratanya penyebaran buku yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Propinsi.⁴¹

Dari wawancara di atas terlihat bahwa di Daerah Pesisir untuk sarana pendidikannya masih kurang, karena masih memerlukan tambahan ruang kelas dan buku-buku yang diperlukan siswa sedangkan untuk prasarana pendidikannya sudah cukup baik tapi perlu untuk direhabilitasi seperti taman sekolah dan perpustakaan.

Dari observasi yang penulis lakukan di tiap sekolah dasar di pesisir jarang yang ada taman sekolahnya padahal dengan adanya taman sekolah para siswa akan merasa nyaman, apalagi untuk siswa SD dan bisa menambah keasrian pemandangan.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Wawancara dengan KY pada tanggal 15 Desember 2008.

3. Program-Program yang Telah Dilaksanakan dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar di daerah pesisir pantai Kumai kecamatan Kumai Kabupaten Kobar.

KY dalam wawancara mengungkapkan:

Untuk menambah daya tampung siswa kami mengadakan program pembangunan ruang kelas baru agar semua calon siswa dapat tertampung, selain itu juga untuk kelompok anak-anak yang putus sekolah kami membuka kelompok kejar paket A dan B.⁴²

a. Pembangunan Ruang Kelas Baru

Dari observasi yang penulis lakukan terlihat ada beberapa sekolah dasar di pesisir yang sedang memperbaharui ruang kelasnya dan membangun ruang kelas baru untuk menambah daya tampung siswa, yaitu di SDN-1 Kubu dan SDN-2 Sebuai.

Pembangunan ruang kelas baru SD maupun SLTP diutamakan pada lokasi yang padat penduduknya karena untuk menambah daya tampung siswa agar semua calon siswa dapat tertampung. Semakin padat penduduknya semakin besar ruang kelas yang dibutuhkan karena calon siswa yang akan memasuki jenjang sekolah semakin tinggi.

Dilihat dari segi jumlah penduduk Desa Kubu dan Desa Sebuai yang paling tinggi jumlah penduduknya. Karena jumlah penduduknya yang banyak itu maka pemerintah telah menyediakan gedung sekolah yang lebih banyak dibandingkan desa lain. Di Kubu terdapat 2 SD yaitu SDN 1 Kubu dan SDN 2 Kubu, dan di Sebuai ada 2 SD yaitu SDN 1 Sebuai dan SDN-2 Sebuai dan 1

⁴²*ibid.*

MIS yaitu MIS B. Miftahul Aula Sebuai. Pembangunan ruang kelas baru adalah program yang efektif untuk mengatasi masalah efisiensi pendidikan.

b. Penambahan Tenaga Guru

Selain pembangunan ruang kelas baru pemerintah juga mengadakan penambahan tenaga guru, seperti yang diungkapkan KY:

Untuk melengkapi kekurangan tenaga guru kami mengadakan peningkatan guru bantu, honor maupun PNS terutama ditempatkan di desa terpencil.⁴³

Guru merupakan unsur pendidikan yang sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Semakin besar jumlah siswa yang sekolah semakin besar pula jumlah guru yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah kekurangan guru maka pemerintah mengadakan peningkatan guru bantu honor maupun PNS, karena sering dijumpai di sekolah-sekolah adanya penempatan guru yang tidak sesuai dengan bidang studi. Suatu sekolah menerima guru baru dalam bidang studi yang sudah cukup, sedang guru bidang studi yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan sehingga seorang guru bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi lain, misalnya guru bahasa harus mengajar pendidikan agama. Program peningkatan guru honor maupun PNS sangat efektif untuk mengatasi masalah efisiensi dan mutu pendidikan.

c. Program Beasiswa dan Pemberian Dana BOS

Untuk meningkatkan efisiensi pendidikan pemerintah mengadakan program beasiswa dan pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah. Program beasiswa ini diberikan bagi anak yang berprestasi dan anak yang kurang mampu. Dengan adanya program beasiswa ini memacu anak untuk

⁴³ Wawancara dengan KY pada tanggal 10 Desember 2008

belajar giat. Dan bagi anak yang keluarganya tidak mampu diberikan beasiswa untuk meringankan beban orang tuanya. Program ini sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi pendidikan dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Dengan adanya program ini masyarakat semakin besar minatnya untuk menyekolahkan anaknya, khususnya yang kurang mampu. Tanpa mengeluarkan biaya banyak, anak mereka bisa sekolah.

d. **Pembukaan Kejar Paket A dan B**

Untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pemerintah membuka program belajar dengan sistem kejar paket A dan B. program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk belajar bagi anak yang tidak melanjutkan sekolah maupun yang putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya program ini masyarakat berkesempatan melanjutkan pendidikan dasarnya guna memperoleh ijazah SD maupun SLTP. Di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai telah dibuka program kejar paket A dan B dari tahun 2003 sampai saat ini. Program ini sangat efektif untuk meningkatkan APK SD dan SLTP. Di pesisir, karena dengan adanya program ini penduduk yang belum punya ijazah SD maupun SLTP dapat mencari pekerjaan.

4. Kendala dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai

Program wajib belajar pendidikan dasar telah dilaksanakan di Daerah Pesisir Pantai Kumai kecamatan Kumai namun dalam pelaksanaannya ada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah.

Seperti yang diungkapkan KY:

Program wajar dikdas sebenarnya sudah dilaksanakan di daerah ini tapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang membuat program tersebut belum sepenuhnya tuntas dilaksanakan, mengingat daerah pesisir adalah daerah yang penduduknya bisa dikatakan tingkat sarana dan prasarana sebagai tempat belajar juga kurang dan tingkat kepedulian masyarakat masih kurang.⁴⁴

Kendala tersebut antara lain:

a. Budaya Masyarakat yang Masih Melekat

Peranan masyarakat dan pendidikan sangat penting, tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Akan tetapi dalam masyarakat sendiri itu ada yang menganggap bahwa pendidikan tidak penting. Karena budaya masyarakat yang masih kental.

Masyarakat pesisir terbiasa mengawinkan anaknya yang masih usia sekolah. Mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi yang akhirnya nanti jadi ibu rumah tangga juga.

RS mengungkapkan:

Anak kami sekolah semua ada seko, sekolah sanawiyah sudah kukawinkan hidupnya macam ituam. Kawalnya yang kada sekolah hidupnya senang padahal susahya menyekolahkan anak bayar itu bayar ini sudah car duit uyuh keperluan Saban Hari banyak ditambah ongkos sekolah lagi sekolah tinggi bagawi ke laut juga, lihat ja di tipi itu banyak yang kada bagawi jadi pengangguran, ada yang menjadi maling, ngemis karena kadida gawian.⁴⁵ (Anak kami sekolah semua dan ada satu yang tamat MTs. Sekarang sudah kawin tapi kehidupannya seperti itu sangat susah. Sementara temannya yang tidak sekolah, hidupnya berkecukupan. Buat kami menyekolahkan anak berat sekali karena harus membayar, padahal cari uang kan susah, untuk kebutuhan sehari-hari saya sudah cukup apalagi ditambah biaya

⁴⁴Wawancara dengan KY pada tanggal 15 Desember 2008

⁴⁵Wawancara dengan RS tanggal 20 Desember 2009.

sekolah. Sering kita lihat di televisi banyak yang tidak kerja, sulit mencari kerja, jadi pengemis dan gelandangan

DN menyatakan:

Orang desa mbak apa gunanya sekolah, padahal kami banyak gawian. Coba mbak liat apalagi musim penaduh gelonbangnya halus kami kami mbak ai terpaksa ke laut kalau kada kaya apa, kami tidak bisa mengandalkan pada kebun kelapa yang kada seberapa ini. Kami harus siap tulak ke laut makanya anak kami yang lagi haluspun diajari am ke laut dan kalau sudah besar bisa am bagawi seorang atau umpat menumpang orang, macam ini am kami di desa ini sekolah kada jadi duit tapai membuang duit lebih baik bagawi.⁴⁶

(Kami orang desa, apa perlu sekolah padahal kami banyak pekerjaan seperti yang mbak lihat ini belum lagi kalau musi teduh, ombak lautan tidak ada. Kami dan anak-anak harus ke laut, kalau tidak bagaimana. Kami tidak bisa mengandalkan dari hasil kebun ini saja, setiap pagi kami harus sudah siap pergi ke laut, kalau tidak makan apa kami, anak-anak kecil sudah dilatih bekerja agar dia terbiasa nanti kalau sudah esar bisa bekerja sendiri atau ikut orang. Kami di desa kebanyakan demikian mbak. Sekolah tidak menghasilkan uang tapi membuang uang lebih baik bekerja).

Kebiasaan orang tua di pesisir apalagi anak laki-laki selalu diarahkan untuk bekerja sejak kecil. Orang tua bersikap begitu karena apabila anak sudah besar diharapkan untuk membantu sehingga kesempatan untuk menuntut ilmu sudah disita dengan pekerjaan yang rutin dilakukan setiap harinya tanpa kenal waktu. Ini biasanya oleh orang tua di pesisir dari waktu ke waktu akhirnya menjadi kebiasaan. Mereka tidak merasa malu kalau anaknya tidak sekolah tetapi mereka malu kalau anaknya tidak bisa membantu bekerja mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

⁴⁶Wawancara dengan DN pada tanggal 20 Desember 2008

Sikap orang tua terhadap anak menjadi masalah dalam pendidikan. Banyaknya anak yang putus sekolah karena bimbingan dari orang tua yang cari nafkah bagi keluarganya.

Menurut SY bahwa kebanyakan para orang tua di Pesisir ini sibuk dengan pekerjaannya masing-masing tanpa memikirkan pendidikan anaknya. Memang ada sebagian yang mementingkan pendidikan tapi kebanyakan mereka sibuk mencari uang untuk kebutuhan hidup. Perhatian kepada anaknya sangat kurang karena mereka sendiri dulu banyak yang tidak sekolah.⁴⁷

Hal senada diungkapkan BS:

Wah kalau masyarakat di sini banyak yang tidak menyekolahkan anaknya sampai SLTA tanam SLTP saja tidak. Apalagi kalau perempuan, mereka tamat SD sudah langsung dinikahkan. Ini sudah menjadi tradisi di daerah situ sejak dulu.⁴⁸

Tradisi atau kebudayaan sangat berpengaruh besar terhadap program pendidikan dasar. Ini menjadi kendala yang harus dipikirkan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Masyarakat ada yang menganggap bahwa sekolah tidak terlalu penting karena apa mereka beranggapan kalau sekolah toh akhirnya akan jadi ibu rumah tangga juga, apalagi untuk perempuan. Hal ini yang seharusnya harus dihilangkan tapi menghilangkan suatu tradisi atau kebudayaan bukan hal yang mudah kalau bukan dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Pemerintah dengan berbagai jalur perlu mengubah persepsi masyarakat terhadap arti pentingnya wajib belajar, orang-orang yang memiliki pengaruh penting

⁴⁷Wawancara dengan SY, tanggal 5 Januari 2009.

⁴⁸Wawancara dengan BS, tanggal 5 January 2009.

dalam masyarakat perlu dilibatkan dalam mengubah kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan. Dengan cara seperti ini diharapkan akan berkembang sistem nilai sosial yang memberikan prioritas pilihan terhadap arti pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga seluruh strata sosial yang ada. Dengan demikian akhirnya masyarakat akan merasa malu dan risih jika tidak menyekolahkan anak-anak mereka minimal sampai ke tingkat pendidikan dasar.

b. Sarana Pendidikan yang tidak Memadai

Selain kondisi masyarakat pesisir yang masih kental, kendala yang dihadapi pemerintah adalah sarana pendidikan yang tidak memadai. Sarana pendidikan sangat penting untuk menunjang suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar. Sarana yang memadai akan memperlancar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Begitupun sebaliknya apabila sarana pendidikan yang tidak memadai akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Pesisir Pantai Kumai, untuk gedung sekolah termasuk ruang belajar yang ada pada sekolah SD maupun MI keadaannya ada yang sudah rusak berat maupun rusak ringan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 19
KONDISI RUANG BELAJAR

No	Keterangan	SD/MI	SMP
1.	Rusak berat	21	2
2.	Rusak ringan	15	5
3.	Baik	36	11

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha Disdikpora

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi atau keadaan gedung sekolah masih memerlukan rehabilitasi guna memperlancar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Selain kondisi gedung yang kurang, jumlah buku yang diperlukan murid juga sangat kurang.

KY dalam wawancaranya menyebutkan:

Untuk masalah sarana pendidikan kami masih memerlukan penambahan ruang belajar terutama untuk di daerah terpencil. Selain penambahan ruang kelas, buku untuk siswa juga masih kurang karena tidak meratanya penyebaran buku yang dilakukan oleh Dinas Provinsi.⁴⁹

Buku adalah sarana pendidikan yang sangat penting yang diperlukan baik guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Buku membantu guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Jika setiap siswa mendapatkan 1 paket buku mempermudah siswa dalam penerimaan materi yang disampaikan oleh guru karena tidak perlu mencatat banyak, tinggal membaca dan memahainya. Pemerintah perlu mengupayakan anggaran penyebaran buku yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dapat merata ke seluruh wilayah seperti di Daerah Pesisir Pantai Kumai.

5. Upaya Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Dinas Dikpora Kecamatan Kumai bersama masyarakat telah mengupayakan berbagai program dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Program-program tersebut antara lain perluasan kegiatan pendidikan luar sekolah yang diutamakan bagi anak yang putus sekolah supaya dapat melanjutkan pendidikannya di SD dan di SLTP.

⁴⁹Wawancara dengan KY pada tanggal 15 Desember 2008.

Seperti yang diungkapkan SN :

Pendidikan non formal sudah dilaksanakan di daerah ini. Kami memprogramkan kejar paket A dan B. program ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2003 sampai sekarang ini. Namun pelaksanaannya ada sedikit hambatan yaitu dari masalah warga belajar itu sendiri dan dana yang masih kurang.⁵⁰

Senada dengan hal tersebut AJ menyatakan:

Yang menjadi warga belajar kebanyakan orang sudah berkeluarga. Jadi waktu belajar mereka kadang tidak masuk. Rata-rata warga belajar sudah bekerja. Jadi kalau waktunya masuk, kadang ada yang tidak masuk karena harus bekerja. Ini jadi masalah dalam kegiatan belajar mengajar dan mempersulit tutor untuk menyampaikan materi. Apalagi yang sudah jadi ibu rumah tangga, kadang anak gak bisa ditinggal dan harus dibawa.⁵¹

a. Keadaan Warga Belajar

Berdasarkan hasil observasi bahwa program kejar paket A dan B telah dilaksanakan di beberapa desa di pesisir. Ada 3 kelompok kejar paket A dan 6 kelompok kejar paket B.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 20
KEADAAN WARGA BELAJAR KEJAR PAKET A

No	Nama program	Kelas	Nama kejar	Jumlah WB	Jumlah tutor	Nama penyelenggara	Alamat
1	Paket A	Kls 5	Kelapa Hijau 1	20 org	2 org	Ardjasarni	Desa Keraya
2	Paket A	Kls 5	Kelapa hijau 2	20 org	2 org	Hasan Basri,SE	Desa Sebuai
3	Paket A	Kls 6	Kepiting	20 org	2 org	Hasan Basri,SE	Desa Sebuai

Sumber: Data Warga Belajar Kejar Paket A tahun 2008

⁵⁰Wawancara dengan SN pada tanggal 10 Januari 2009

⁵¹Wawancara dengan AJ pada tanggal 10 Januari 2009

Tabel. 21
KEADAAN WARGA BELAJAR KEJAR PAKET B

No	Nama program	Kelas	Nama kejar	Jumlah WB	Nama penyelenggara	Alamat
1	Paket B	Kls 7	Keraya Permai	40 org	Syamsudin	Keraya
2	Paket B	Kls 9	Bengkirai 1	20 org	Syamsudin	Sebuai
3	Paket B	Kls 9	Bengkirai 2	20 org	Syamsudin	Sebuai
4	Paket B	Kls 9	Sindur	20 org	Syamsudin	Sebuai
5	Paket B	Kls 9	Rumput laut 1	20 org	Aidil	Sungai Bakau
6	Paket B	Kls 9	Rumput laut 2	20 org	Aidil	Sungai Bakau

Sumber: Data Warga Belajar Kejar Paket B tahun 2008

Tabel di atas menunjukkan bahwa di daerah pesisir terdapat 3 kelompok belajar program paket A dan 6 kelompok belajar paket B. yang masing-masing kelompok belajar rata-rata terdiri dari 20 orang warga belajar.

Untuk desa Keraya terdapat 2 kelompok belajar yaitu Paket A dan Paket B. desa Sebuai terdapat 5 kelompok belajar yaitu 2 paket A dan 3 paket B. desa Sungai Bakau terdapat 2 kelompok belajar paket B. sedangkan desa Kubu dan Teluk Bogam tidak terdapat program kejar paket A dan B.

b. Keadaan Tutor

Berdasarkan hasil wawancara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggara program kejar paket A dan B adalah kepala penyelenggara dan tutornya.

Mengenai identitas tutor program kejar paket A dan B di pesisir pantai Kumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang menjadi tutor/ pengajar pada program kejar paket A dan B berjumlah 20 orang dan berlatar belakang pendidikan keguruan.

c. Waktu Kegiatan Belajar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa kegiatan program belajar mengajar kejar paket A dan B tidak tetap sebagaimana sekolah formal di SD dan SMP karena harus menyesuaikan dengan kesibukan tutor dan warga belajar yakni dilaksanakan pada sore hari.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan SN "Untuk tempat pelaksanaannya kami meminjam kelas di SD setempat dan pelaksanaannya pada sore hari, 1 minggu tatap muka 3 kali".⁵²

Jadi pelaksanaan proses belajar mengajar diadakan 3 kali dalam seminggu yakni hari rabu, kamis dan sabtu. Setiap satu kali tatap muka diperlukan waktu 60 menit.

6. Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program wajib belajar pendidikan dasar dapat dituntaskan karena adanya suatu kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun orang tua murid.

Peranan masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sangat besar tapi ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya wajib belajar pendidikan dasar. Peran seta masyarakat dalam

⁵²Wawancara dengan SN pada tanggal 10 Januari 2009

hal ini adalah mereka membantu pemerintah dalam hal membantu penyediaan tempat, menyumbang dana untuk pembangunan sekolah melalui Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3).

Dalam pendidikan luar sekolah mereka ikut berpartisipasi dalam program kejar paket A dan kejar paket B dengan menjadi tenaga pengajar (tutor) karena sebagian tutor ada yang sudah menjadi guru di kelembagaan dan ada yang belum jadi PNS. Untuk masyarakat yang belum tamat SD dan SMP mereka ikut menjadi warga belajar. Ini salah satu bentuk partisipasi masyarakat guna mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar di pesisir.

Seperti yang diungkapkan BS: "Warga sini banyak yang ikut kejar paket A dan B. Meskipun mereka ada sudah yang berkeluarga tapi saya lihat semangat belajar mereka masih ada".⁵³

Dari apa yang sudah diungkapkan BS di atas bahwa sebagian masyarakat di pesisir sudah ikut berpartisipasi dan sudah tergerak hatinya untuk meneruskan sekolahnya meskipun melalui program kejar paket A dan kejar paket B. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk belajar tidak harus dimiliki oleh anak-anak saja tapi walaupun sudah tua semangat belajar juga harus tetap ada karena ilmu tidak memandang usia.

⁵³ Wawancara dengan BS pada tanggal 5 Januari 2009.

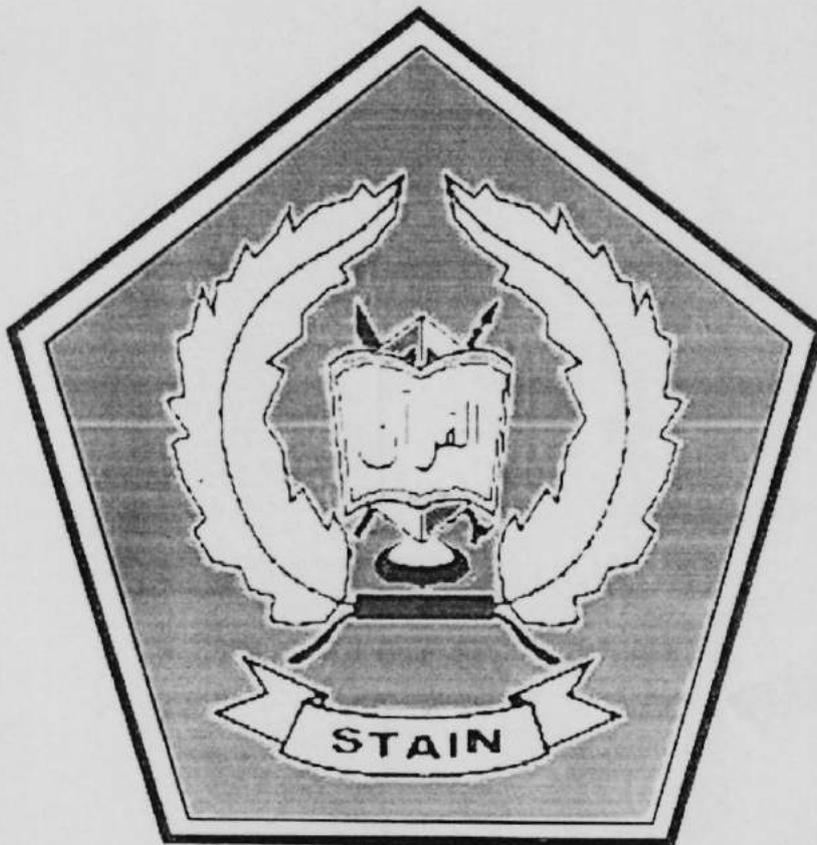
Tabel. 22
KEADAAN TUTOR PROGRAM KEJAR PAKET A DAN B DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI

No	Nama	Tempat Tgl Lahir	Agama	Pendidikan Terakhir	Tempat Mengajar
1	Syamsudin	Kumai, 04-08-1968	Islam	D-II	Bengkirai - 1, Sindur
2	Sua	Pilang Muduk,16-06-1970	Kristen	D-II	Bengkirai - 1, Sindur
3	Talawang	Ramang,07-09-1969	Kristen	D-II	Bengkirai - 1, Sindur
4	Andi Rahmat	-	Islam	S-1	Bengkirai - 1
5	M. Rijali	Banjarmasin,18-03-1982	Islam	D-II	Bengkirai - 1
6	Maprohinsyah	Kumai, 22-07-1977	Islam	S1/Teknik	Bengkirai - 1, Kelapa Hijau
7	Matus Suryono	Batu Keramat,17-11-1970	Kristen	SGO	Bengkirai - 2
8	Hasan Basri,SE	Sabuai, 03-01-1981	Islam	S1	Bengkirai - 2, Kelapa Hijau
9	M. Saini	Kumai, 16-01-1960	Islam	SLTA	Bengkirai - 2
10	Kaspul Anwar	Keraya, 21-02-1984	Islam	D-II	Bengkirai - 2, Sindur
11	Aidil	Dandang, 15-11-1962	Islam	D-II	Rumput Laut 1 & 2
12	Burhadi,S.Pd	Sungai Bakau,16-05-1975	Islam	S-1	Rumput Laut 1
13	Masari	Sungai Bakau, 01-03-1969	Islam	D-II	Rumput Laut 1
14	Rijal	Kotawaringin Barat, 14-02-1968	Islam	D-II	Rumput Laut 1
15	Zainab,S.Pd	Sungai Bakau, 26-05-1981	Islam	S-1	Rumput Laut 1
16	Arbain	Sungai Bakau, 15-11-1971	Islam	SPG	Rumput Laut 1
17	Agustian,S.Pd	Pangkalan Bun,21-06-1978	Islam	S-1	Rumput Laut 2
18	Hartati, S.Pd	Pangkalan Bun, 18-04-1980	Islam	S-1	Rumput Laut 2
19	Suryanah	Pangkalan Bun, 08-09-1971	Islam	SPG	Rumput Laut 2
20	A. Yani	Pangkalan Bun, 02-04-1962	Islam	DII	Rumput Laut 2

Sumber: Daftar Tutor Kejar Paket A dan B tahun 2008

BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar antara lain mengadakan program pembangunan ruang kelas baru, penambahan tenaga guru, mengadakan program beasiswa dan pemberian dana bantuan operasional sekolah.
2. Dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Pesisir Pantai Kumai terdapat beberapa kendala antara lain budaya masyarakat pesisir yang masih kental, sarana pendidikan yang tidak memadai serta tingkat kepedulian masyarakat yang masih kurang.
3. Upaya pemerintah dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai adalah mengadakan program kejar paket A dan kejar paket B.
4. Masyarakat Pesisir sebagian telah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar yaitu dengan menyumbang dana dan menyediakan tempat untuk kejar paket A.

B. Saran

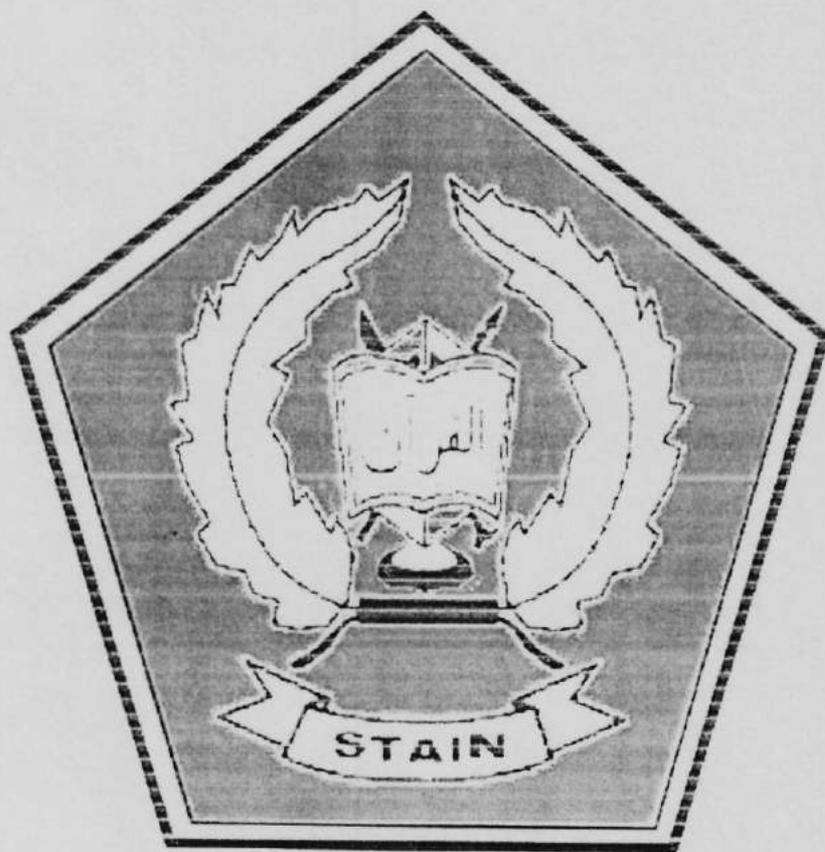
1. Diharapkan pemerintah terus berupaya menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari kota seperti Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Untuk Dinas Pendidikan Provinsi diharapkan dalam melakukan penyebaran buku-buku paket harus merata agar daerah-daerah yang jauh dari perkotaan tidak kekurangan lagi untuk sarana pendidikannya.
3. Untuk masyarakat pesisir agar terus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Beeby, *Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bagian Penerbitan LP3S, 1982.
- Darlan, Norsanie, *Strategi Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun bagi Masyarakat Desa Tertinggal*, Palangka Raya: Universitas Palangka Raya, 2000.
- Depag RI, *Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, *Pelangi Pendidikan*, Jakarta, 2005.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nur, Arifin, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Qodir, Abdul, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya: t.np., 1999.
- Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2008 tentang Guru, Jakarta: BP. Cipta Jaya, 2009.
- Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suyanto dan Abbas, *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak dan Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tirtaraharja, Umar, dan L. Sula, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, Bandung: Fokus Media.
- Usman, Uzer, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

LAMPIRAN



PEDOMAN OBSERVASI

1. Kondisi/keadaan sosial masyarakat daerah pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai.
2. Keadaan lingkungan masyarakat daerah pesisir.
3. Kegiatan/mata pencaharian masyarakat daerah pesisir.
4. Kondisi sarana pendidikan daerah pesisir.
5. Sarana transportasi sebagai sarana penunjang
6. Pelaksanaan kejar paket A dan B.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja program-program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?
2. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?
 - a. Kesadaran masyarakat
 - b. Sarana pendidikan
3. Apa saja upaya dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?
4. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?
 - a. Apakah masyarakat mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?
 - b. Apakah bentuk peran serta masyarakat dalam program Wajib Belajar Pendidikan Dasar?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Data jumlah penduduk daerah pesisir
2. Data jumlah penganut agama daerah pesisir
3. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI
4. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs
5. Data jumlah SD daerah Pesisir
6. Data jumlah MI daerah Pesisir
7. Data jumlah SMP/MTs daerah Pesisir
8. Data jumlah siswa SD daerah Pesisir
9. Data jumlah siswa MI daerah Pesisir
10. Data jumlah siswa SMP daerah Pesisir
11. Data jumlah kelompok kejar paket A di pesisir
12. Data jumlah kelompok kejar paket B di pesisir
13. Data jumlah tutor kejar paket A dan B di pesisir.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax. 22105 Email: stain_pry@yahoo.com

Nomor : Sti.18.1/PP.00.9/770/2007
Hal : **Persetujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing**

Palangka Raya, 5 Juni 2007

Kepada
Yth. Sdr. **Nely Fathonah**
NIM. 0301110595

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan judul dan desain proposal yang saudara ajukan dan sesuai hasil seleksi judul skripsi Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut:

“Penerapan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Masyarakat di Daerah Pesisir Pantai Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat”

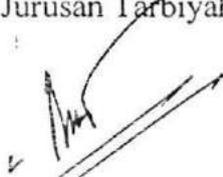
selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara:

1. Dr. Tutut Sholihah, M.Pd sebagai Pembimbing I
2. Yuliani Khalifah, S.Ag sebagai Pembimbing II

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan pembimbing skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

An. Ketua
Ketua Jurusan Tarbiyah,


Dra. HAMDANAH HM, M. Ag
NIP. 150246249

Tembusan:

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya Up. Pembantu Ketua I
2. Yth. Dr. Tutut Sholihah, M.Pd sebagai Pembimbing I
3. Yth. Yuliani Khalifah, S.Ag sebagai Pembimbing II

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

Judul : PENERAPAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR
PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

Nama : NELY FATHONAH

Nim : 030 111 0595

Jurusan : TARBIYAH

Program Studi : PAI (Pendidikan Agama Islam)

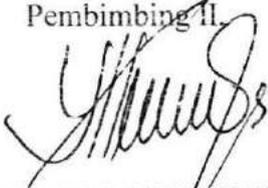
Palangka Raya, 4 September 2008

Menyetujui

Pembimbing I,


DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 150 228 804

Pembimbing II,


YULIANI KHALIFAH, M.Pd.I
NIP. 150 285 623

Palangka Raya, 4 September 2008

Perihal : ***Mohon Diseminarkan
Proposal Skripsi***

Kepada
Yth. Ketua Panitia Seminar Proposal
Skripsi
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NELY FATHONAH
NIM : 030 111 0595
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : PAI (Pendidikan Agama Islam)
Judul Skripsi : PENERAPAN PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA
MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR
PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Pembimbing : 1. DR. TUTUT SHOLIHAH.M.Pd
2. YULIANI KHALFIAH,S.Ag

Dengan ini mengajukan kepada Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) eksemplar Proposal Skripsi saya.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Pembimbing I,



DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 150 228 804

Pemohon,



NELY FATHONAH
NIM. 030 111 0595



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

No: 11/PAN-SPSM/SG/X/2008

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:

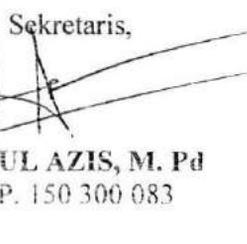
Nama : NELY FATHONAH
NIM : 030 111 0595
Jurusan/Prodi : TARBIYAH/PAI
Judul Proposal : PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 11 September 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggung Utama: JASIAH, M.Pd dan moderator: ASMAWATI, M. Pd dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 18 Oktober 2008

PANITIA

Ketua, Sekretaris,

GITO SUPRIADI, M. Pd NIP. 150 300 082

ABDUL AZIS, M. Pd NIP. 150 300 083

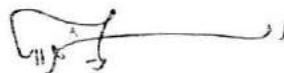
CATATAN HASIL SEMINAR

Penyaji / NIM : NELLY FATHOMNAH / 030 111 0595
Jurusan / Prodi : TARBIAH / PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Judul :
PENERAPAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR MASYARAKAT DI DAERAH PESISIR PANTAI
KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
Pananggap Utama : JASAH M.Pd.
Pembimbing : 1. Dr. TUTUT SHOLIHAH M.Pd.
2. YULIANI KHALIFAH M.Pd.

CATATAN PERBAIKAN :

Latar belakang disesuaikan urutannya cara penulisan
kalimat 3 cari data yang terdapat
kajian pustaka tentang hobitile di tambahi lagi
khususnya 20 ~~ter~~ literatur di susuaikan dgn rentannya
langkah pikir di sempurnakan lagi
~~Analisis data di susuaikan dengan~~
Analisis data di susuaikan maknanya lagi di
susuaikan dengan pendapat Miles dan Huberman.

Palangka Raya, 11 September 2008
Moderator


ASMAWATI M.Pd.
NIP. 150 311 460

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

JUDUL : PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI
DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NAMA : NELY FATHONAH

NIM : 030 111 0595

JURUSAN : TARBIYAH

PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Palangka Raya, 13 Oktober 2008

Menyetujui:

Pembimbing I,

DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 150 228 804

Pembimbing II,

YULIANI KHALIFAH, M.Pd
NIP. 150 285 623

Mengetahui :

Ketua Jurusan Tarbiyah,


Dr. HAMIDENAH HM, M.Ag.
NIP. 150 246 249

Palangka Raya, 18 Oktober 2008

Hal : **Mohon Izin Riset/Penelitian**

Kepada yang terhormat,
Ketua STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **NELY FATHONAH**
NIM : 030 111 0595
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : PAI
Alamat : Jl. Kenangan No.16 G.Obos XII Palangka Raya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tempat/Lokasi Penelitian:

1. Daerah Pesisir Pantai Kumai
2. Kantor Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu dari tanggal **26** Oktober sampai dengan **26** Nopember 2008

Dan akan menggunakan metode:

1. Dokumen
2. Observasi
3. Wawancara

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Pembimbing I

DR. TUTUT SHOLIHAH, M.Pd
NIP. 150 228 804

Pemohon

NELY FATHONAH
NIM. 030 111 0595



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73112
Telp. (0536) 3226356 Fax. 3222105 email: stain_pry@yahoo.com

Palangka Raya, 23 Oktober 2008

Nomor : Sti.15.8/TL.00/ 1401 /2008
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Mohon Ijin Observasi / Penelitian

Kepada

Yth. Bupati Kotawaringin Barat

Di. Pangkalan Bun

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Nely Fathonah
N I M : 030 111 0595
Jurusan / Prodi : Tarbiyah / PAI
Jenjang : Strata I (S1)
Lokasi Penelitian : 1. Daerah Pesisir Pantai Kumai
2. Kantor Pendidikan dan Pengajaran Kec. Kumai
Judul Skripsi : " PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT
DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT "
Metode : Dokumentasi , Observasi dan Wawancara
Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) bulan, terhitung sejak Tanggal 26 Oktober 2008
s/d 26 Januari 2009

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I,



ARDIMI, M.Ag W
P. 150 265 103

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Kantor Pendidikan dan Pengajaran Kec. Kumai
3. Arsip



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 300/33 /Kesbang. III / 2008

Dasar : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Palangka Raya Nomor :
Sti.15.8/TL.00/1401/2008 Perihal Permohonan Izin Observasi / Penelitian.

Mengingat : 1. Surat Dirjen Kesbang dan Politik Nomor : 548.02/185.D.I. tanggal 16
Pebruari 2007 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 42 Tahun 2002
Tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian
/ Pendaftaran bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.

Dengan ini diberikan kepada :

Nama : NELY FATHONAH.

NIM : 0301110595

Alamat : -

Jenjang/Jurusan/Study : Strata I (S1) / Tarbiyah / PAI.

Akan melaksanakan Penelitian Tugas Akhir Skripsi dengan cara Penelitian yang
berjudul "PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
PADA MASYARAKAT DAERAH PESISIR PANTAI KUMAI KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT"

Lama Waktu : 3 (tiga) bulan TMT 26 Oktober 2008 s/d 26 Januari
2008.

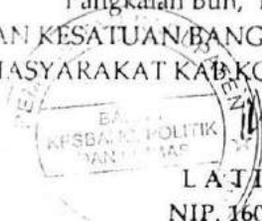
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian / Magang yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat dengan menunjukkan Surat ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak berkaitan dengan Judul Skripsi.
3. Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat izin ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah , sewaktu – waktu dapat dibatalkan bila disalahgunakan.
5. Selesai melakukan penelitian/magang harus menyampaikan laporan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada :
- Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kab.Ktw.Barat.
6. Surat izin ini berlaku sejak dikeluarkan.

Demikian Surat ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pangkalan Bun, 1 November 2008.
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KAB. KOTAWARINGIN BARAT



L A T I P, S H
NIP. 160 012 858

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat (Sebagai laporan).
2. Kepala Badan KESBANG, POL. DAN LINMAS
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua STAIN di Palangka Raya
4. Kepala Kantor Pendidikan dan Pengajaran Kec. Kumai di Kumai
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
CABANG DINAS KECAMATAN KUMAI

Alamat : Jl. Panglima Utar No. 16 Desa Sungai Tendang Telepon (0532) 61135 Kumai 74181

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 423.1/ 178 / CABDIS/Dikpora

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- N a m a** : **NELY FATHONAH**
- N I M** : **0 3 0 1 1 1 0 5 9 5**
- Jurusan** : **Tarbiyah**
- Program Studi** : **P A I**
- Jenjang** : **S.1**

Telah mengadakan Penelitian “ **Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Masyarakat Daerah Pesisir Pantai Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat** “ di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kumai, 29 Januari 2009

Kepala Cabang Dinas,



KASUMAYADI
 NIP. 131 602 495



UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Alamat: Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre Telp. (0536) 3226356 Fax 3222105
Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

SURAT KETERANGAN

No. 44/UPB-STAIN/X/2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:

Nama : Hely Fathonah
NIM : 0301110595
Jurusan : Tarbiyah / PAI

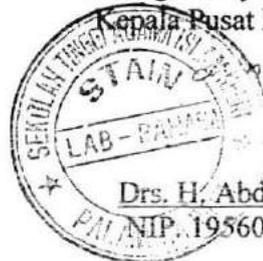
Telah diperiksa dan direvisi terjemahannya guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PEN-
DIDIKAN DASAR PADA MASYARAKAT DI DAERAH
PESISIR PANTAI KUMAI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 5-10-2009

Kepala Pusat Pelayanan Bahasa,



Drs. H. Abdul Oodir, M.Pd

NIP. 19560203 199003 1 0001

CURRICULUM VITAE

Nama : **NELY FATHONAH**
TTL : **Klaten, 06 Desember 1984**
Status : **Belum Kawin**
Alamat : **Jl. Kenanga No.16 G.Obos XII Palangka Raya**
Riwayat Pendidikan : **1. SDN-1 Gesikan tahun 1997 di Klaten**
2. SLTP Negeri 1 Gantiwarno tahun 2000 di Klaten
3. SMA Negeri 1 Wedi tahun 2003 di Klaten.

Identitas Orang Tua:

Nama ayah : **KANDAR SUKARNO**
Nama Ibu : **Alm. TUMBUK**
Nama Saudara : **1. Fajriah Indriyani**
Alamat Orang Tua : **Klaten, Jawa Tengah**

Palangka Raya, Oktober 2009
Penulis,



NELY FATHONAH
NIM. 030 111 0595



(Pintu Gerbang Masuk Kawasan Desa Pesisir)



(Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai)



(Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kumai)



(Wawancara dengan Penilik Pendidikan Luar Sekolah)



(Keadaan Lingkungan Pesisir)



(TK/SD Satu Atap di Desa Kubu)